

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumberdaya, pelaksanaa, kebijakan, dan pelaksanaan program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui rencana kinerja dan perjanjian kinerja serta melaporkan akuntabilitas pelaksanaan kinerja.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan syarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Perlunya sistem pertanggungjawaban daerah atas segala proses tindakan-tindakan yang dibuat dalam rangka tata tertib menuju instrumen akuntabilitas daerah.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka setiap daerah diharuskan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan Instansi Pemerintah.

LAKIP merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja, yaitu pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah, prestasi sebuah instansi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja. Hasil evaluasi tersebut adalah masukan bagi instansi untuk meningkatkan kinerjanya.

Penyusunan LAKIP berorientasi pada hasil realistis yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun sesuai visi, misi, tujuan/sasaran dan program, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

B. Dasar Hukum Pembentukan dan Tugas Pokok

Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 043 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dibentuklah susunan struktur organisasi yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas pokok kedinasan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan selaku aparat Pelayanan Publik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal dan pelayanan publik di bidang perizinan dan nonperizinan.

Adapun fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di daerah;
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal;
3. Koordinasi pelaksanaan kebijakan promosi potensi daerah yang dapat menarik penanaman modal;
4. Koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
5. Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan ekonomi dan sumber daya alam;
6. Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan infrastruktur dan sosial;
7. Pelaksanaan layanan pengaduan, kebijakan dan informasi;
8. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

C. Struktur Organisasi

Dinas penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terorganisasi dalam struktural jabatan yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1. Kepala Dinas**
- 2. Sekretariat**, terdiri dari atas :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
 - b. Sub Bagian Umum dan kepegawaian
- 3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal**
- 4. Bidang Promosi Penanaman Modal**
- 5. Bidang Pengendalian Penanaman Modal**
- 6. Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam**
- 7. Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial:**
- 8. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi**
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional**

D. Isu Strategis SKPD

Ditinjau dari tugas dan fungsinya, maka permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri dari unsur pelayanan dan investasi. Perlu dilakukan suatu analisis terhadap permasalahan-permasalahan serta isu-isu strategis.

Gambaran isu dan kondisi yang ada sebagai berikut:

1. Kondisi perekonomian global, mengalami perlambatan ekonomi
2. Investasi di kalsel masih relative menarik dan potensial untuk dikembangkan
3. Kalsel sebagai Gerbang Ibukota Negara
4. Hilirisasi Industri
5. Pelaksanaan Pelayanan Publik terkait Perizinan dan Nonperizinan

Adapun beberapa permasalahan umum yakni :

1. Peningkatan kinerja penanaman modal untuk menarik investor ke Kalimantan Selatan, melalui :
 - a. Analisis dan penelitian tentang kondisi dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi investor apabila ingin berinvestasi di Kalimantan Selatan
 - b. Mengkoordinasi permasalahan-permasalahan investasi diatas, untuk diclearkan, atau minimal dikurangi
 - c. Meningkatkan sinergi pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan investasi di Kalimantan Selatan
 - d. Membuat rencana tindak peningkatan investasi di Kalimantan Selatan.
2. Peningkatan kinerja pelayanan untuk kemudahan perizinan dan kualitas yang lebih baik.

Melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, perumusan isu strategis tersebut dilakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok serta fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas mengordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, sedangkan fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan antara lain adalah sebagai perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah yaitu melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang Perizinan dan Nonperizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, keamanan, dan kepastian dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya, dari tugas dan fungsi tersebut, maka permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum seluruh daerah di Provinsi Kalimantan Selatan menyusun RUPM;
2. Masih sedikit identifikasi data potensi daerah;
3. Sinkronisasi perencanaan dan kebijakan penanaman modal;
4. Belum optimalnya promosi investasi;
5. Ketidakmerataan penanaman modal;
6. Masih kurangnya kesadaran perusahaan akan kewajibannya menyampaikan LKPM;
7. Data PMA/PMDN tidak sinkron antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Menuju pelayanan prima;
9. Terbatasnya sumber daya manusia;
10. sarana dan prasarana belum optimal;
11. sistem informasi pelayanan belum optimal;
12. Keterbatasan Anggaran.

Tabel Permasalahan Pelayanan SKPD dan Pendorong

Permasalahan Pelayanan SKPD	Pendorong
<ul style="list-style-type: none">- Belum optimalnya promosi investasi- Belum teridentifikasinya data potensi daerah- Ketidakmerataan penanaman modal- Pelayanan belum optimal- Masih kurangnya kesadaran perusahaan akan kewajibannya menyampaikan LKPM.- Data PMA/PMDN tidak sinkron antara pusat, provinsi dan kab/kota- Sinkronisasi Perencanaan- Belum seluruh daerah di Provinsi Kalimantan Selatan menyusun RUPM;	<ul style="list-style-type: none">- Kejelasan visi jangka panjang Kalimantan Selatan- Ketersediaan lahan dan komoditi unggulan- Kondusifnya situasi sosial masyarakat dan keamanan- Wilayah bebas dan ancaman gempa bumi dan letusan gunung merapi- Kesiapan kelembagaan penanaman modal- Kesiapan aparatur pemerintah yang berkomitmen

Penentuan Isu-isu Strategis

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan diatas, maka isu strategis dalam penyelenggaraan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan lima tahun ke depan adalah:

1. Belum optimalnya investasi di Kalimantan Selatan; dan
2. Belum optimalnya pelayanan perizinan dan nonperizinan

E. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LAKIP, dapat disesuaikan sebagaimana contoh berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi penjelasan singkat tentang latar belakang penyusunan, tugas pokok dan fungsi, urusan yang ditangani dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjalankan dan menjabarkan tugas pokok fungsi urusan yang ditangani.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menyajikan secara ringkas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Pemerintah Daerah pada Tahun 2023, dan Penetapan Kinerja Tahun 2023

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan analisis pencapaian kinerja, keberhasilan dan kegagalan, sebagai pertanggungjawaban pencapaian hasil tahun 2023

BAB IV. PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan hasil menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perumusan visi dan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 merupakan salah satu tahap penting dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Bahwa Visi dan Misi setiap SKPD di lingkup Provinsi Kalimantan Selatan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder*. Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 adalah :

“KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA

Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 :

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur
2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian
4. Tata Kelola Pemerintahan yang lebih Fokus pada Pelayanan Publik
5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana

Tujuan dan Sasaran SKPD

Dalam menentukan tujuan dan sasaran SKPD harus mengacu pada Visi dan Misi RPJMD. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumber daya dalam organisasi harus mempunyai kompetensi daya saing tinggi untuk mencapai tujuan.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh SKPD selama kurun waktu lima tahun ke depan, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai upaya mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026. Tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari setiap misi.

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan sesuai RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026 mengacu pada **Misi II dan Misi IV**.

Adapun keterkaitan visi, misi, tujuan, dan sasaran digambarkan sebagai berikut:

Visi
"KALSEL MAJU (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) SEBAGAI GERBANG IBUKOTA NEGARA"



Misi II
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata

Misi IV
Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus pada Pelayanan Publik



Tujuan
Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Sasaran
Meningkatnya Investasi yang Berdampak ke Daerah

Sasaran
Meningkatnya Pelayanan Publik



Indikator
Realisasi Investasi PMA dan PMDN

Indikator
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Kondisi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Program dan Kegiatan

KONDISI AWAL DAN ISU	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM /KEGIATAN
<p>Kondisi 1) Kondisi perekonomian global, berdampak pada harga komoditi ekspor kalsel, mengalami perlambatan ekonomi yaitu dari 5,35% (2013) menjadi 4,85% (2014), titik terendah pada 3,84% (2015 2.) Investasi di kalsel tahun 2014 mengalami penurunan, terutama di sektor tambang 3) Daya tarik investasi di sektor tersebut juga mengalami perlambatan</p> <p>Isu 1) Belum optimalnya investasi di Kalsel 2) Belum optimalnya pelayanan perizinan dan nonperizinan</p>	<p>Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi • Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan <p>Sasaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Investasi yang Berdampak ke Daerah • Meningkatnya Pelayanan Publik <p>Strategi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Iklim Penanaman Modal • Peningkatan Promosi Penanaman Modal • Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal • Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal • Peningkatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pemberian Fasilitasi di Bidang Penanaman Modal • Peningkatan Promosi Penanaman Modal • Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal • Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal • Peningkatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal :: <ol style="list-style-type: none"> a) Penetapan Pemberian Fasilitas /Intensif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi b) Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi 2. Program Promosi Penanaman Modal <ol style="list-style-type: none"> a) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Provinsi 3. Program Pelayanan Penanaman Modal <ol style="list-style-type: none"> b) Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal <ol style="list-style-type: none"> a) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 5. Program Pengelolaan Data dan Sistem informasi Penanaman Modal <ol style="list-style-type: none"> b) Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar - benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil. Berdasarkan uraian makna perjanjian kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator*).

Secara rinci, rekapitulasi penetapan indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Jabatan	Kinerja Utama	Indikator	Target
Kepala Dinas	Peningkatan Investasi	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	11,66 Trilyun Rupiah
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (88.25)
Sekretaris	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Nilai SAKIP DPMPTSP	A (83)
		Persentase Penyerapan Anggaran SKPD	85%
		Persentase Aset yang tercatat	100%
	Meningkatnya Pelayanan Sarana Prasarana dan Admiministrasiu Perkantoran Kepegawaian	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD	80%
	Pelayanan Sarana dan Prasarana dan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian	100%
	Peningkatan Kualitas SDM SKPD	Persentase Peserta Pelatihan/Bimtek yang paham	100%
Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian	Persentase Surat Menyurat, Surat Keluar dan Arsip yang dikelola	100%

		Persentase Urusan Pemenuhan Rumah Tangga	100%
		Persentase Pemenuhan Bahan Analisa dan Evaluasi Organisasi dan Ketatalaksanaan	100%
		Persentase Pegawai yang Administrasi Kepegawaiannya dilayani secara Tertib	100%
	Tersedianya Sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan SKPD	Jumlah Dokumentasi Penyediaan Sarana dan Prasarana	1 Dokumen
	Tersedianya Dokumen Kebutuhan Diklat	Jumlah Dokumen Kebutuhan Diklat	1 Dokumen
Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset	Tersedianya Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Nilai Komponen Perencanaan pada LKIP DPMPTSP	28
		Nilai Komponen Pelaporan pada LKIP DPMPTSP	14
		Jumlah Dokumen Kinerja sesuai Ketentuan	6 Dokumen
	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala	1 Dokumen
	Terlaksananya Pengelolaan Aset SKPD	Persentase Aset yang dikelola	100%
Kabid Perencanaan dan pengembangan iklim Penanaman Modal	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Realisasi pelaksanaan Kemitraan	100%
		Persentase Potensi Investasi dipromosikan	100%
		Persentase Potensi Investasi yang berbasis Lingkungan	25%
	Pengembangan Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Potensi Investasi Daerah yang teridentifikasi Berbasis Lingkungan	1 Dokumen
		Persentase Kesesuaian RUPM dengan Sektor Investasi	100% 8 Sektor
	Pengembangan Pemberdayaan Usaha	Jumlah Kemitraan dunia usaha	4 Kemitraan
Kabid Promosi Penanaman	Peningkatan Calon Investor	Persentase peningkatan Calon Investor	30% 4 Investor

Modal		Persentase promosi yang ditindaklanjuti	25% 5 Promosi
	Peningkatan Pelaksanaan Promosi Investasi	Persentase Potensi Investasi daerah yang diminati	50% 10 Potensi
		Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi	3 Kali

Adapun Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 terlampir.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

1. Sasaran RPJMD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kalimantan Selatan nomor 2 tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026, telah ditetapkan 5 (lima) program prioritas urusan penanaman modal beserta Indikator dan targetnya sebagai berikut:

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Akhir	
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				Target	(Juta. Rp)	Target	(Juta. Rp)	Target	(Juta. Rp)	Target	(Juta. Rp)	Target	(Juta. Rp)	Target		(Juta. Rp)
Urusan Penanaman Modal																
Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Rp	7.76 T	12.715 T	1.640	11.66 T	1.968	12.55T	2.362	13.52 T	2.834	14.55 T	3.401	15.67T	4.082	15.67T
Peningkatan Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Indeks	A (88.35)	A 88)	350	A(88.25)	1.500	A (88.50)	1.861	A (88.75)	1.952	A(89)	2.343	A (89.25)	2.821	A (89.25)

Selanjutnya ditetapkan juga indikator kinerja daerah pada urusan penanaman modal sebagai berikut:

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Capaian					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Triliun Rp	12.715	11.66	12.55	13.52	14.55	15.67	15.67

Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan ditentukan oleh seberapa jauh tingkat capaian dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran tersebut diklasifikasikan berdasarkan kategori capaian kinerja dengan rentang capaian sebagai berikut:

- a. *Lebih dari 90%* untuk kategori capaian **Sangat Memuaskan**;
- b. *80% s/d 90%* untuk kategori capaian **Memuaskan**;
- c. *70% s/d 80%* untuk kategori capaian **Sangat Baik**;
- d. *60% s/d 70%* untuk kategori capaian **Baik**;
- e. *Diatas 50% s/d 60%* untuk kategori capaian **Cukup**;
- f. Kurang dari 50% untuk kategori capaian **Kurang**;

Sasaran strategis dan indikator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan yang telah direncanakan adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis : <ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan Investasi yang Berdampak ke Daerah• Meningkatkan Pelayanan Publik	Peningkatan Investasi dengan indikator : 1. Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp)
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dengan indikator : 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Terdapat 1 (satu) sasaran strategis pada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan dengan 2 (dua) indikator didalamnya, dimana salah satunya menjadi indikator kinerja daerah sesuai dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026.

Dalam perencanaan program kerja tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan telah menetapkan kelompok indikator kinerja kegiatan. Kelompok indikator *input* terdiri dari besarnya dana yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan dihitung dengan satuan rupiah. Sedangkan indikator *output* merupakan hasil yang langsung diperoleh ketika kegiatan selesai dilaksanakan, jenisnya bervariasi tergantung pada jenis kegiatannya.

Indikator *outcome* merupakan indikator yang terbentuk karena adanya *output*, yang bisa berupa pemanfaatan *ouput* yang dapat diukur dalam jangka

pendek (*intermediate outcome*). Untuk menilai atau mengukur *capaian kinerja*, menggunakan tolok ukur *indikator sasaran* yang melekat pada kegiatan.

Kinerja Utama pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Peningkatan Investasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan 2 (dua) indikator yakni: Realisasi Investasi PMA dan PMDN dan Indeks kepuasan Masyarakat (IKM). Realisasi investasi PMA dan PMDN dengan capaian tahun 2023 **146.15 %** masuk dalam klarifikasi **Memuaskan**. Sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian **103.95%** juga masuk dalam klarifikasi **sangat memuaskan**.

2. Esselon II (Kepala Dinas)

Terdapat 2 (dua) Kinerja Utama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan (Esselon II) yakni:

- a. Peningkatan Investasi dengan indikator : Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp)
- b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dengan indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

Analisa capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dimana Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 (dua) kinerja utama dan 2 (dua) indikator dengan target yang akan dicapai setiap tahunnya. Untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja tersebut dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1	Peningkatan Investasi	Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp)	11.660.000.000.000	19.760.000.000.000	146.15%	Angka realisasi investasi yang terdiri dari PMA dan PMDN dijumlahkan dalam satuan Rupiah (Rp) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Adapun realisasi investasi didapat dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap perusahaan. LKPM dibuat setiap triwulan, sehingga dapat terlihat perkembangan reliasasi pelaksanaan investasinya.	Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel, BKPM RI
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (88.50)	A (94.25)	106.50%	Analisis Survey Kepuasan Masyarakat	Dinas PM dan PTSP
Rata-rata Capaian					126.33%		

Penjelasan :

Pada Kinerja Peningkatan Investasi dengan indikator Realisasi Investasi PMA dan PMDN, tahun 2023 ditargetkan sebesar 13.52 triliun rupiah. Adapun realisasinya sebesar **13,72 triliun rupiah** sehingga capaian kinerja sebesar **101.48%**.

Rumus indikator realisasi investasi PMA dan PMDN yaitu Angka realisasi investasi yang terdiri dari PMA dan PMDN dijumlahkan dalam satuan Rupiah (Rp) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Adapun realisasi investasi didapat dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap perusahaan. LKPM dibuat setiap triwulan, sehingga dapat terlihat perkembangan reliasasi pelaksanaan investasinya.

Pada Kinerja kedua yakni Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditargetkan A dengan nilai 88.50. Adapun realisasinya adalah **A dengan nilai 94.25**, sehingga kinerja mencapai **106.50%**.

Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) dilakukan dengan melaksanakan analisis survey kepuasan masyarakat (SKM) dengan langkah sebagai berikut:

- Menyediakan kotak saran, ruang pengaduan dan kuesioner survey Kepuasan Masyarakat;
- Diselesaikannya aduan/keluhan masyarakat terkait pelayanan perizinan;
- Pembagian kuesioner kepada pelanggan

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

a. Perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Target 2022 (sesuai RPJMD dan Renstra)	Realisasi 2022 dan % capaian	Target 2023 (sesuai RPJMD dan Renstra)	Realisasi 2023 dan % capaian
1	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	11.660.000.000.000	16.295.807.780.000 (131.18%)	13.520.000.000.000	19.760.000.000.000 (146.15%)
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (88.25)	A (88.75) 100.57%	A (88.50)	A (94.25) 106.50%

Penjelasan

Indikator indeks kepuasan masyarakat (IKM) tahun 2022 dengan nilai 88.25 dengan predikat A sesuai Permenpan RB nomor 14 Tahun 2017. Sedangkan Tahun 2023 dengan nilai A (88.50) Adapun unsur penilaian sebagai berikut:

- Persyaratan
- Prosedur
- Waktu pelayanan
- Biaya/tarif
- Produk Layanan
- Kompetensi Pelaksana
- Perilaku pelaksana
- Sarana dan prasarana
- Penanganan pengaduan dan masyarakat

b. Perbandingan kinerja sesuai RPJMD dan Renstra

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	2021			2022			2023			2024			2025			2026		
		TARGET	REAL	CAPAIAN	TARGET	REAL	CAPAIAN	TARGET	REAL	CAPAIAN	TARGET	REAL	CAPAIAN	TARGET	REAL	CAPAIAN	TARGET	REAL	CAPAIAN
TARGET RPJMD KALSEL (RENSTRA DPMPSTSP PROV. KALSEL):																			
- Realisasi Investasi (Rp.Triliun)	7.76	10.83	12.71	117.41%	11.66	15.29	131.18%	12.55	19.76	146.15%	13.52	-	-	14.55	-	-	15.67	-	-
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (88.35)	B (85)	A(88)	TERCAPAI	A (88.25)	A (88.75)	TERCAPAI	A (88.50)	A (94.25)	TERCAPAI	A (88.75)	-	-	A (89)	-	-	A (89.25)	-	-

c. Perbandingan Realisasi kinerja tingkat Regional dan Nasional

	Kalsel	Kalteng	Kalbar	Kaltim	Kaltara	Indonesia
Realisasi Investasi (Triliun Rupiah)	12,72	8,73	17,54	41,18	5,74	901,02

d. Target SDGs

Nama Indikator	Program	Satuan	Target Pencapaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persen	100	100	100	100	100
Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persen	20	25	30	35	40
Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persen	30	32	36	40	42
Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Poin	88,25	88,5	88,75	89	89,25
Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persen	100	100	100	100	100
Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persen	35	40	45	50	50
Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persen	100	100	100	100	100

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Pada tahun 2023, target yang telah ditetapkan diperkirakan akan tercapai. Hal ini dikarenakan situasi yang sudah mulai normal pasca pandemic covid 19.

Upaya selanjutnya untuk pencapaian target Realisasi Investasi sebagai berikut :

1. Pengawasan Berkelanjutan kepada PMA & PMDN, didukung dengan APBD dan Dekonsentrasi APBN
2. Himbauan dan edaran pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
3. Fasilitasi kepada perusahaan yang bermasalah atau mengalami kesulitan baik dalam pelaksanaan usahanya sampai dengan pelaporan kegiatannya yang berupa LKPM
4. Selalu berkoordinasi dengan Pemerintah pusat (BKPM RI) dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui DPMPTSP Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan
5. Promosi Investasi yang berkelanjutan, antara lain : pameran investasi, forum investasi, *one-one meeting*, dan lainnya.
6. *Matchmaking* dalam rangka kemitraan dunia usaha.
7. Penyusunan dokumen, kajian, serta kebijakan untuk peningkatan investasi
8. Inovasi SEJADI (Seberkas Jadi Dua Izin), agar izin yang semula tidak masuk skema penanaman modal menjadi masuk dari bagian penghitungan investasi, sehingga dapat memacu peningkatan realisasi investasi.
9. Gerai pelayanan perizinan di daerah dalam rangka memudahkan masyarakat dalam hal pelayanan perizinan.
10. Perbaikan iklim investasi melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS).
11. Penyederhanaan perizinan (pengurangan waktu, syarat, dan prosedur)
12. Peningkatan Standar Pelayanan dengan implementasi SMM ISO 9001:2015.

✓ Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

- Kurangnya kesadaran Perusahaan untuk melaporkan LKPM
- Adanya perubahan system dari oss 1.1 ke oss RBA, sehingga mengalami kendala untuk menarik data rencana investasi perusahaan
- Kurang maksimalnya Kab/Kota dalam mengejar target investasi masing-masing yang telah diberikan
- Adanya pergantian/mutasi jabatan di DPMPTSP Kab/Kota sehingga kesulitan untuk melakukan koordinasi

✓ Rencana Tindak Lanjut

- Melakukan koordinasidengan PIC dimasing-masing Kab/Kota terkait pencapaian realisasi investasi untuk TA 2023
- Melaksanakan fasilitasi permasalahan yang dialami perusahaan bersama satgas percepatan pelaksanaan berusaha Prov Kalsel
- Melaksanakan Bimteks OSS RBA dan Bimtek impelemntasi pengawasan perizinan berubah
- Melakukan kerjasama dengan bidang perizinan untuk pendataan rencana investasi perusahaan penanaman modal.

Indikator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 pada urusan penanaman modal yakni: Realisasi Investasi dengan target **13.52** triliun rupiah, sasaran RPJMD sama dengan capaian kinerja eselon II.

Capaian realisasi investasi pada tahun 2023 sebesar 13,72 triliun rupiah atau 101.48% dari target tahun 2022 sebesar 11.66 Trilyun. Realisasi investasi mengalami peningkatan.

Disisi lain, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan menunjukkan perbaikan. Hal ini dapat dilihat dari Indikator pengukur kepuasan masyarakat yakni Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

tahun 2022 sebesar 88.25 dengan predikat A, sedangkan tahun 2023 A 88.50 sesuai Permenpan RB nomor 14 Tahun 2017.

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan:

1. Penyesuaian persyaratan, spesifikasi, dan biaya/tarif yang mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
2. Pendelegasian seluruh kewenangan perizinan dan nonperizinan lingkup pemerintah provinsi kepada DPMPTSP Prov.Kalsel sebanyak 18 bidang dan 145 jenis perizinan dan nonperizinan.
3. Pengelompokkan prosedural pengurusan perizinan dan nonperizinan menjadi 3 (tiga) Standar Operasional Prosedur (SOP): 1. Dengan pertimbangan teknis tanpa peninjauan lapangan, 2. Tanpa pertimbangan teknis dengan peninjauan lapangan, dan 3. Tanpa pertimbangan teknis tanpa peninjauan lapangan. Prosedural yang dibuat adalah untuk kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam berurusan. Telah dilakukan pemangkasan proses untuk menciptakan kemudahan berusaha bagi masyarakat.
4. Konsistensi implementasi maklumat pelayanan yang menyatakan bahwa aparat menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik, dan apabila tidak ditepati, siap menerima sanksi yang berlaku.
5. Reward petugas pelayanan terbaik
6. Penyediaan dan Penambahan tenaga *Front Officer*
7. Tersedianya *Help Desk*
8. Implementasi perizinan secara *online* dengan Sistem Aplikasi Perizinan Online (SIMAPAN) dan *Online Single Submission (OSS)*
9. *Digital Signature* untuk percepatan dan kemudahan perizinan nonperizinan.
10. Pembentukan Satuan Petugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Kalimantan Selatan serta keaktifan didalamnya
11. Implementasi ISO 9001:2015

4) Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta prioritas pembangunan, Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 yang mendukung pencapaian indikator kinerja daerah urusan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan:
 - i. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - ii. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD
 - iii. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - c) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 - d) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
 - iv. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - v. Pengadaan Barang Milik Daerah
 - a) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - b) Pengadaan Mebel
 - c) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- vi. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c) Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor
- vii. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- II. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan:
 - i. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah Provinsi
 - a) Penetapan Kebijakan Daerah Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Moda
 - b) Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
 - ii. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
 - a) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi
 - b) Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi
- III. Program Promosi Penanaman Modal, dengan kegiatan dan Sub Kegiatan:
 - i. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
 - a) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
 - b) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

- IV. Program Pelayanan Penanaman Modal, dengan kegiatan dan Sub Kegiatan:
 - i. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - a) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - b) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
 - c) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
 - d) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
- V. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan kegiatan dan Sub Kegiatan:
 - i. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
 - a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - c) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- VI. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dengan kegiatan dan Sub Kegiatan:
 - i. Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi
 - a) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

3. Esselon III (Sekretaris)

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET DAN CAPAIAN			CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
			TARGET	REALISASI BULAN INI	% CAPAIAN		
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A (83)	A 83.30	100.36%	Persentase Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas PM dan PTSP
		Persentase Penyerapan Anggaran SKPD	85%	85.72%	100.85%	Persentase serapan anggaran SOPD	Dinas PM dan PTSP
		Persentase Aset yang tercatat	100%	100%	100.00%	Persentase Aset yang tercatat (harus 100%)	Dinas PM dan PTSP
2	Meningkatnya Pelayanan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran Kepegawaian	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD	80%	80%	100.00%	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SOPD	Dinas PM dan PTSP
		Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian	100%	100.00%	100.00%	Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian PNS SKPD	Dinas PM dan PTSP
3	Peningkatan Kualitas SDM SKPD	Persentase Peserta Pelatihan/Bimtek yang paham	100%	100%	100.00%	Persentase Peserta Pelatihan/Bimtek yang paham	Dinas PM dan PTSP

Penjelasan

1. Indikator Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan PTSP yaitu 83.30 yang merupakan penilaian dari beberapa komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal.
2. Indikator Persentase Penyerapan Anggaran SKPD yaitu 85.72%
3. Indikator persentase aset yang tercatat yaitu 100% (seluruh aset tercatat)
4. Indikator persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD yaitu 80%
5. Indikator Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian yaitu 100%

6. Indikator Persentase Peserta Pelatihan/Bimtek yang paham yaitu 100%

- Bimtek Penggunaan Kawasan Hutan yang dilimpahkan kepada Gubernur
- Bimtek Pelatihan Karyawan dan Bimtek Untuk Bidang Service Excellent Workshop Creative Service Excellent
- Bimtek Peraturan Perundang-undangan dalam rangka mengikuti Pelatihan Karyawan dan Bimtek untuk Bidang Service Excellent Service
- Bimtek Pelatihan Training of Trainer (TOT) Online Single Submission (OSS)
- Bimtek Service Excellent Workshop Creative Service Excellent
- Bimtek Pengelolaan Website

Kinerja Sekretaris Dinas (esselon III) dengan 6 (enam) indikator menghasilkan rata-rata capaian 100.20% dengan klarifikasi **sangat memuaskan**.

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

NO	INDIKATOR	2022		2023	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A (83)	A 87.32	A (83)	A 83.30
2.	Persentase Penyerapan Anggaran SKPD	85%	80.55	85%	85.72
3.	Persentase Aset yang tercatat	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD	80%	80%	80%	80%
5.	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian	100%	100%	100%	100%
6.	Persentase Peserta Pelatihan/Bimtek yang paham	100%	100%	100%	100%

Penjelasan :

Indikator Pertama yaitu Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditargetkan A dengan nilai 83 dan terealisasi **A dengan nilai 83.30**, sehingga kinerja mencapai **100.36%**.

Indikator Kedua Persentase Penyerapan Anggaran SKPD ditargetkan 85% dengan terealisasi , sehingga kinerja mencapai 85.72%

Indikator Ketiga Persentase Aset yang tercatat ditargetkan 100% dengan terealisasi 100% sehingga kinerja mencapai 100%

Indikator Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD ditargetkan 80% dengan terealisasi 80% sehingga kinerja mencapai 100%

Indikator Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian ditargetkan 100% dengan terealisasi 100% sehingga kinerja mencapai 100%

Indikator Persentase Peserta Pelatihan/Bimtek yang paham ditargetkan 100% dengan terealisasi 100% sehingga kinerja mencapai 100%

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022 dan % capaian	Target 2023	Realisasi 2023 dan % capaian
1	Nilai SAKIP DPMPTSP	A (83)	A 87.32 (105.20%)	A (83)	A 83.30 (100.36%)
2	Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian PNS SKPD	100%	100% (100.00%)	100%	100% (100.00%)
3	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD	80%	80% (100.00%)	80%	80% (100.00%)
4	Persentase Peserta Pelatihan/ Bimtek yang paham	100%	100% (100.00%)	100%	100% (100.00%)
5	Persentase Aset yang tercatat	100%	100% (100.00%)	100%	100% (100.00%)

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022 dan % capaian	Target 2023	Realisasi 2023 dan % capaian
6	Persentase Penyerapan Anggaran SKPD	85%	94.76%	85%	85.72% 100.85%

Penjelasan :

Indikator Pertama yaitu Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditargetkan BB dengan nilai 77.50 dan terealisasi **A dengan nilai 83.30**, sehingga kinerja mencapai **100.36%**.

Indikator Kedua yaitu Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian PNS SKPD ditargetkan 80% dan terealisasi **80%**, sehingga kinerja mencapai **100%**.

Indikator Keempat yaitu Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD ditargetkan 100% dan terealisasi **100%**, sehingga kinerja mencapai **125.00%**.

Indikator Kelima yaitu Persentase Peserta Pelatihan/ Bimtek yang paham ditargetkan 90% dan terealisasi **100%**, sehingga kinerja mencapai **111.11%**.

Indikator Keenam yaitu Persentase Aset yang tercatat ditargetkan 100% dan terealisasi **100%**, sehingga kinerja mencapai **100%**.

Indikator Ketujuh yaitu Persentase Penyerapan Anggaran SKPD ditargetkan 90% dan terealisasi **85.72%**, sehingga kinerja mencapai **100.85%**.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya-upaya yang telah dilakukan

- Melaksanakan tugas secara Efektif dan Efisiensi anggaran

3.2 Hambatan dalam mencapai Kinerja

- Tingginya satuan harga pada DPA yang merupakan implelementasi perpres 33 pada SIPD, sehingga anggaran belanja besar. Realisasi belanja relative rendah, tetapi realisasi fisik terpenuhi. Sehingga terdapat SILPA pada anggaran tahun 2023.

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Koordinasi dengan TAPD terkait pengalokasian anggaran.

4) Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2023:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan:
 - i. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - ii. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD
 - iii. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - c) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 - d) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

iv. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

v. Pengadaan Barang Milik Daerah

- a) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b) Pengadaan Mebel
- c) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

vi. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c) Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor

vii. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1) Esselon IV (Kasubbag Umum dan Kepegawaian)

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian	Persentase surat Masuk, surat keluar dan arsip yang dikelola	100%	100%	100%	Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat	Dinas PM dan PTSP
		Persentase Urusan Pemenuhan Rumah tangga	100%	100%	100%	Jumlah dokumentasi Urusan Pemenuhan Rumah Tangga	Dinas PM dan PTSP
		Persentase pemenuhan bahan analisa dan evaluasi organisasi dan ketatalaksanaan	100%	100.00%	100.00%	Jumlah dokumentasi bahan analisa dan evaluasi organisasi dan ketatalaksanaan	Dinas PM dan PTSP
		Persentase Pegawai yang administrasi Kepegawaiannya dilayani secara tertib	100%	100%	100.00%	Jumlah Pegawai yang Administrasi Kepegawaiannya dilayani secara tertib	Dinas PM dan PTSP
2	Tersedianya sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan SKPD	Jumlah Dokumentasi penyediaan sarana dan prasarana	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	Jumlah Dokumen terkait penyediaan sarana dan prasarana	Dinas PM dan PTSP
3	Tersedianya dokumen kebutuhan diklat	Jumlah dokumen kebutuhan diklat	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	Jumlah dokumen kebutuhan diklat	Dinas PM dan PTSP

Penjelasan :

- Indikator jumlah dokumen pelayanan surat menyurat adalah surat keluar dan masuk terdokumentasi seluruhnya selama 12 bulan
- Indikator Persentase Urusan Pemenuhan Rumah tangga yaitu erpenuhinya air, listrik, internet dan ATK
- Indikator Persentase pemenuhan bahan analisa dan evaluasi organisasi dan ketatalaksanaan yaitu Penyusunan Draft Tupoksi dan SOTK Baru

- Indikator jumlah dokumen terkait sarana dan prasarana adalah tersedianya dokumen Pengadaan Barang dan jasa sesuai yang teranggarkan dan direalisasikan
 - Indikator jumlah pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib adalah menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian meliputi kenaikan gaji berkala, Pembuatan KARIS/KARSU dan surat ijin cuti, Kenaikan pangkat, usul pensiun, Usul penerima tanda penghargaan satyalencana karya satya
 - Indikator jumlah peserta pelatihan/bimtek yaitu Bimtek Penggunaan Kawasan Hutan yang dilimpahkan kepada Gubernur, Bimtek Pelatihan Karyawan dan Bimtek Untuk Bidang Service Excellent Workshop Creative Service Excellent, Bimtek Peraturan Perundang-undangan dalam rangka mengikuti Pelatihan Karyawan dan Bimtek untuk Bidang Service Excellent Service, Bimtek Pelatihan Training of Trainer (TOT) Online Single Submission (OSS), Bimtek Service Exceellent Workshop Creative Service Excellent, Bimtek Pengelolaan Website
- Kinerja eselon IV rata-rata capaian adalah 100.% dengan klarifikasi **sangat memuaskan**, dengan 6 (enam) indikator.

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

NO	INDIKATOR KINERJA	2022	2023		
		REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Persentase surat Masuk, surat keluar dan arsip yang dikelola	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase Urusan Pemenuhan Rumah tangga	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase pemenuhan bahan analisa dan evaluasi organisasi dan ketatalaksanaan	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase Pegawai yang administrasi Kepegawaiannya dilayani secara tertib	100%	100%	100%	100%
5.	Jumlah Dokumentasi penyediaan sarana dan prasarana	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
6.	Jumlah dokumen kebutuhan diklat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Penjelasan :

Indikator Pertama yaitu Persentase surat Masuk, surat keluar dan arsip yang dikelola ditargetkan 100% dan terealisasi **100%**, sehingga kinerja mencapai **100%**.

Indikator Kedua yaitu Persentase Urusan Pemenuhan Rumah tangga ditargetkan 100% dan terealisasi **100%**, sehingga kinerja mencapai **100%**.

Indikator Ketiga yaitu Persentase pemenuhan bahan analisa dan evaluasi organisasi dan ketatalaksanaan ditargetkan 100% dan terealisasi **100%**, sehingga kinerja mencapai **100%**.

Indikator Keempat yaitu Jumlah Dokumentasi penyediaan sarama dan prasarana ditargetkan 100% dan terealisasi **100%**, sehingga kinerja mencapai **100.00%**.

Indikator Kelima yaitu Jumlah Dokumentasi penyediaan sarana dan prasarana ditargetkan 1 Dokumen dan terealisasi **1 Dokumen**, sehingga kinerja mencapai **100.00%**.

Indikator Keenam yaitu Jumlah dokumen kebutuhan diklat ditargetkan 1 Dokumen dan terealisasi **1 Dokumen**, sehingga kinerja mencapai **100.00%**.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022 dan % capaian	Target 2023	Realisasi 2023 dan % capaian
1.	Persentase surat Masuk, surat keluar dan arsip yang dikelola	100%	100% 100%	100%	100% 100%
2.	Persentase Urusan Pemenuhan Rumah tangga	100%	100% 100%	100%	100% 100%
3.	Persentase pemenuhan bahan analisa dan evaluasi	100%	100% 100%	100%	100% 100%

	organisasi dan ketatalaksanaan				
4.	Persentase Pegawai yang administrasi Kepegawaiannya dilayani secara tertib	100%	100% 100%	100%	100% 100%
5.	Jumlah Dokumentasi penyediaan sarana dan prasarana	1 Dokumen	1 Dokumen 100%	1 Dokumen	1 Dokumen 100%
6.	Jumlah dokumen kebutuhan diklat	1 Dokumen	1 Dokumen 100%	1 Dokumen	1 Dokumen 100%

Penjelasan :

Indikator Pertama yaitu Persentase surat Masuk, surat keluar dan arsip yang dikelola yaitu 2022 terealisasi **100% dengan capaian 100%**.sedangkan pada tahun 2023 terealisasi **100% dengan capaian 100%**.

Indikator Kedua yaitu Persentase Urusan Pemenuhan Rumah Tangga pada 2022 terealisasi **100% dengan capaian 100%**.sedangkan pada tahun 2023 terealisasi **100% dengan capaian 100%**.

Indikator Ketiga yaitu Persentase pemenuhan bahan Analisa dan evaluasi organisasi dan ketatalaksanaan pada tahun 2022 terealisasi **100% dengan capaian 100%**. sedangkan pada tahun 2023 terealisasi **100% dengan capaian 100%**

Indikator Keempat yaitu Persentase Pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib, pada tahun 2022 terealisasi **100% dengan capaian 100.00%**, sedangkan pada tahun 2023 **100% dengan capaian 100%**

Indikator kelima yaitu Jumlah dokumentasi penyediaan sarana dan prasarana pada tahun 2022 terealisasi **1 dokumen** dengan capaian **100.00%** , sedangkan pada tahun 2023 **1 dokumen** dengan capaian **100%**

Indikator Keenam yaitu jumlah dokumen kebutuhan diklat, pada tahun 2022 terealisasi **100% dengan capaian 100.00%**, sedangkan pada tahun 2023 **100% dengan capaian 100%**

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya –upaya yang telah dilakukan

- Melakukan penertiban format perumusan surat keluar/surat masuk di tiap bidang dan sekretariat kantor
- Melakukan penertiban format perumusan surat izin/kode surat izin dibidang perizinan
- Melengkapi dan memperbaiki sarana prasarana kantor khususnya dibagian pelayanan
- Merekap segala urusan administrasi seluruh pegawai kantor

3.2 Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

- Pengarsipan surat menyurat dan dokumen perizinan yang belum terorganisir
- Ruang sarana pengarsipan surat/dokumen yang belum memadai
- Anggaran pelatihan/bimtek yang terbatas sehingga belum bisa mengakomodir kebutuhan pelatihan/bimtek kantor

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Mengatur dan mengorganisir mulai dari masuk surat sampai kepada pengarsipannya
- Mengajukan anggaran ditahun berikutnya untuk rehab/perbaikan sarana dan prasarana pelayanan dikantor

4) Analisis Program/kegiatan Penunjang Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2023

a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

b. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

c. Pengadaan Barang Milik Daerah

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2) Esselon IV (Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1	Tersedianya Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Nilai Komponen Perencanaan pada LKIP DPMPTSP	28	25.50	91.07%	Nilai komponen pelaporan pada LKIP SKPD	Dinas PM dan PTSP
		Nilai Komponen Pelaporan pada LKIP DPMPTSP	14	12,30	87.86%	Nilai komponen perencanaan pada LKIP SKPD	Dinas PM dan PTSP
		Jumlah Dokumen Kinerja sesuai Ketentuan	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00%	Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan	Dinas PM dan PTSP
2	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala	Dinas PM dan PTSP
3	Terlaksananya Pengelolaan Aset SKPD	Persentase aset yang dikelola	100%	100%	100,00%	Jumlah Aset yang dikelola	Dinas PM dan PTSP
Rata-rata Capaian					95,79%		

Penjelasan :

Indikator Nilai Komponen Perencanaan pada LKIP DPMPTSP yaitu 25.50

Indikator Nilai Komponen Pelaporan pada LKIP DPMPTSP yaitu 12.30

Indikator Jumlah Dokumen Kinerja sesuai ketentuan 6 Dokumen yaitu Penyusunan LKPJ/LPPD, Penyusunan Renja Perubahan, Penyusunan Renja 2023, Penyusunan LAKIP dan Penyusunan Laporan tahunan dan Penyusunan Renstra

Indikator jumlah dokumen laporan keuangan 1 dokumen tersedianya laporan keuangan DPMPTSP Prov Kalsel Tahun anggaran 2023.

Indikator Persentase aset yang dikelola 100% yaitu

- Laptop 1 Unit
- PC Unit 3 Unit - Kendaraan Roda Dua 2 Unit
- Printer 1 Unit
- Kendaraan Operasional Roda 4 unit

Kinerja eselon IV rata-rata capaian adalah 95.79% dengan klarifikasi **sangat memuaskan**, dengan 5 (lima) indikator.

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

NO	INDIKATOR KINERJA	2022	2023		
		REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Nilai Komponen Perencanaan pada LKIP DPMPTSP	28,94	28	25.50	103,36%
2.	Nilai Komponen Pelaporan pada LKIP DPMPTSP	14,10	14	12.30	100,71%
3.	Jumlah Dokumen Kinerja sesuai Ketentuan	5 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00%
4	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%

5	Persentase Aset yang dikelola	100%	100%	100%	100,00%
---	-------------------------------	------	------	------	---------

Penjelasan :

Indikator nilai komponen perencanaan pada LKIP DPMPTSP ditargetkan tahun 2023 nilai 28 terealisasi 25.50 sehingga kinerja mencapai 91.07%

Indikator nilai Nilai Komponen Pelaporan pada LKIP DPMPTSP ditargetkan tahun 2023 nilai 14 terealisasi 12.30 sehingga kinerja mencapai 87.86%

Indikator Jumlah Dokumen Kinerja sesuai Ketentuan ditargetkan tahun 2023 6 dokumen sehingga kinerja mencapai 100%

Indikator Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala ditargetkan tahun 2023 1 dokumen sehingga kinerja mencapai 100%

Indikator Persentase aset yang dikelola tahun 2023 ditargetkan 100% sehingga kinerja mencapai 100%

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022 dan % capaian	Target 2023	Realisasi 2023 dan % capaian
1	Nilai Komponen Perencanaan pada LKIP DPMPTSP	28	28,94 103,36%	28	25,50 91,07%
2	Nilai Komponen Pelaporan pada LKIP DPMPTSP	14	14,10 100,71%	14	12,30 87.86%
3.	Jumlah Dokumen Kinerja sesuai Ketentuan	5 Dokumen	5 Dokumen 100.00%	6 Dokumen	6 Dokumen 100.00%

4.	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala	1 Dokumen	1 Dokumen 100.00%	1 Dokumen	1 Dokumen 100.00%
5.	Persentase aset yang dikelola	100%	100% 100.00%	100%	100% 100.00%

Penjelasan :

Indikator nilai komponen perencanaan pada LKIP DPMPTSP ditargetkan tahun 2023 nilai 28 terealisasi 25.50 sehingga kinerja mencapai 91.07%

Indikator nilai Nilai Komponen Pelaporan pada LKIP DPMPTSP ditargetkan tahun 2023 nilai 14 terealisasi 12.30 sehingga kinerja mencapai 87.86%

Indikator Jumlah Dokumen Kinerja sesuai Ketentuan ditargetkan tahun 2023 6 dokumen sehingga kinerja mencapai 100%

Indikator Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala ditargetkan tahun 2023 1 dokumen sehingga kinerja mencapai 100%

Indikator Persentase aset yang dikelola tahun 2023 ditargetkan 100% sehingga kinerja mencapai 100%

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya-upaya yang telah dilakukan

- Melaksanakan tugas secara Efektif dan Efisiensi anggaran
- Koordinasi intensif dengan Bappeda, Bakeuda, Biro Organisasi, dan Inspektorat

3.2 Hambatan dalam mencapai Kinerja

- Tingginya satuan harga pada DPA yang merupakan implemementasi perpres 33 pada SIPD, sehingga anggaran belanja besar. Realisasi belanja relative rendah, tetapi realisasi fisik terpenuhi. Sehingga terdapat SILPA pada anggaran tahun 2021.
- Pemahaman terkait indicator kinerja oleh stakeholder masih belum maksimal

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Koordinasi dengan TAPD terkait pengalokasian anggaran
- Koordinasi terkait indikator kinerja dengan Biro Organisasi

3) Analisis Program/kegiatan Penunjang Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2022 :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- c) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- d) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- e) Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- f) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah

- (i) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

4. Esselon III (Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Realisasi pelaksanaan Kemitraan	100%	100%	100%	Jumlah Realisasi Pelaksanaan Kemitraan dibagi Jumlah Kemitraan Dunia Usaha x 100%	Dinas PM dan PTSP
		Persentase Potensi Investasi dipromosikan	100%	100%	100%	Jumlah Potensi Investasi daerah yang dapat dipromosikan dibagi Jumlah Potensi Investasi di 13 Kab/Kota x 100%	Dinas PM dan PTSP
		Persentase Potensi Investasi yang berbasis Lingkungan	20%	20%	100%	Jumlah Potensi Investasi yang Berbasis Lingkungan dibagi Jumlah Potensi Investasi x 100%	Dinas PM dan PTSP
	Identifikasi Potensi dan Kebijakan Investasi	Jumlah Dokumen Potensi Investasi Daerah yang teridentifikasi Berbasis Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Potensi Investasi Daerah yang teridentifikasi Berbasis Lingkungan dibagi seluruh potensi investasi yang ada di Kalsel x 100%	Dinas PM dan PTSP
		Persentase Kesesuaian RUPM dengan Sektor Investasi	100 % (8 sektor)	100 % (8 sektor)	100%	Jumlah Realisasi Sektor Investasi dibagi Jumlah sektor Investasi pada RUPM x 100%	Dinas PM dan PTSP
	Fasilitasi Dunia Usaha dengan Perusahaan PM	Jumlah Kemitraan Dunia Usaha	4 Kemitraan	4 Kemitraan	100%	Jumlah Kemitraaan Dunia Usaha	Dinas PM dan PTSP
Rata-rata Capaian					100,00.%		

Penjelasan :

- a. Persentase Realisasi Pelaksanaan Kemitraan yaitu 8/8 kemitraan (100%) sehingga capaian nya 100%

Perusahaan Besar	UMKM
Vendor Bagas Mualang, Lantan Wasnawati	Jamilah Fanesya Sasirangan
BPD Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kalsel Dr Hj Rosally Gunawan	Jamilah Fanesya Sasirangan

Vendor Bagas Mualang, Lantan wasnawati	Kartinah Kerupuk dan Amplang Ikan Pipih Berdikari
Vendor Bagas Mualang, Lantan wasnawati	Fuad Hasan Sasirangan
BPD Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kalsel Dr Hj Rosally Gunawan	Fuad Hasan Sasirangan
Vendor Bagas Mualang, Lantan wasnawati	Rusimah Dodol Madu Kasirat Raisa
Vendor Bagas Mualang, Lantan wasnawati	Esti Sapto Rini Banana Smoke D'Jajanan
Vendor Bagas Mualang, Lantan wasnawati	Siti Jaleha Kue Kering Abon Ikan Tenggiri
Vendor Bagas Mualang, Lantan wasnawati	Nur Ulfah Sasirangan Kotabaru Bubuhan Sasirangan Kreative

b. Persentase Potensi Investasi Dipromosikan dengan capaian 100%

<ul style="list-style-type: none"> • Cabe Hiyung • Ikan Gabus • PLTA Kusan Tanah Bumbu • Hotel Aerocity Banjarbaru • Pemotongan Hewan Modern Banjarbaru
--

c. Persentase Potensi investasi yang berbasis lingkungan yaitu 100% sehingga capaian nya 100%

<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Jejangkit Ecopark
<ul style="list-style-type: none"> • Pulau Curiak Mangrove Center Stasiun Riset Bekantan

d. Jumlah Dokumen Potensi Investasi Daerah yang teridentifikasi Berbasis Lingkungan yaitu 1 dokumen sehingga capaiannya 100% yaitu tersedianya 1 dokumen potensi investasi berbasis lingkungan

e. Persentase Kesesuaian RUPM dengan Sektor Investasi yaitu target 100% sehingga capaiannya 100% yaitu

<ul style="list-style-type: none"> • Sektor Pariwisata • Sektor Pangan • Sektor Infrastruktur dan Sosial • Sektor Energi 	<ul style="list-style-type: none"> • Sektor Industri • Sektor Perdagangan • Sektor UMKM • Sektor Jasa
--	---

f. Jumlah Kemitraan Dunia Usaha yaitu target 4 Kemitraan sehingga capaiannya 100% yaitu :

- Dian Lia Ramayani : Dian Lia Sasirangan pewarna alam

- Nurmaina Kuliner : Pewarna Alam kerupuk udang/haruan
- Karlina Kacang mandai
- Sri Eka Apriliana : Galery Skariliana

Kinerja eselon III rata-rata capaian adalah 100% dengan klarifikasi **sangat memuaskan**, dengan 6 (enam) indikator

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

NO	INDIKATOR KINERJA	2022	2023		
		REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Persentase Realisasi pelaksanaan Kemitraan	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase Potensi Investasi dipromosikan	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase Potensi Investasi yang berbasis Lingkungan	20%	20%	20%	100%
4.	Jumlah Dokumen Potensi Investasi Daerah yang teridentifikasi Berbasis Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.	Persentase Kesesuaian RUPM dengan Sektor Investasi	100% (8 Sektor)	100% (8 Sektor)	100% (8 Sektor)	100%
6.	Jumlah Kemitraan Dunia Usaha	4 Kemitraan	4 Kemitraan	4 Kemitraan	100%

Penjelasan :

- Indikator Pertama Persentase Realisasi pelaksanaan Kemitraan pada tahun 2022 ditargetkan **100%** dan terealisasi **100%** sehingga kinerja mencapai **100%**, sedangkan tahun 2023 ditargetkan **100%** dan terealisasi **100%** sehingga kinerja mencapai **100%**
- Indikator Kedua yaitu Persentase Potensi Investasi dipromosikan pada tahun tahun 2022 ditargetkan **100%** dan terealisasi **100%** sehingga kinerja mencapai **100%**, **sedangkan** tahun 2023 ditargetkan **100%** dan terealisasi **100%** sehingga kinerja mencapai **100%**
- Indikator Ketiga yaitu Persentase Potensi Investasi yang berbasis Lingkungan pada tahun 2022 ditargetkan 20% dan terealisasi 20% sehingga kinerja

mencapai 100%, sedangkan tahun 2023 ditargetkan **20%** dan terealisasi **20%** sehingga kinerja mencapai **100%**

- d. Indikator keempat yaitu Jumlah Dokumen Potensi Investasi Daerah yang teridentifikasi Berbasis Lingkungan ditargetkan **1 dokumen** dan terealisasi **1 dokumen** sehingga kinerja mencapai **100%**
- e. Indikator Kelima Persentase Kesesuaian RUPM dengan Sektor Investasi ditargetkan **100%** dan terealisasi **100%** sehingga kinerja mencapai **100%**
- f. Indikator Jumlah Kemitraan Dunia Usaha ditargetkan **4 Kemitraan** dan terealisasi **4 Kemitraan** sehingga kinerja mencapai **100%**

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022 dan % capaian	Target 2023	Realisasi 2023 dan % capaian
1.	Persentase Realisasi pelaksanaan Kemitraan	100%	100% 100%	100%	100% 100%
2.	Persentase Potensi Investasi dipromosikan	100%	100% 100%	100%	100% 100%
3.	Persentase Potensi Investasi yang berbasis Lingkungan	20%	20% 100%	20%	20% 100%
4.	Jumlah Dokumen Potensi Investasi Daerah yang teridentifikasi Berbasis Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen 100%	1 Dokumen	1 Dokumen 100%
5.	Persentase Kesesuaian RUPM dengan Sektor Investasi	100%	100% 100%	100%	100% 100%
6.	Jumlah Kemitraan Dunia Usaha	4 Kemitraan	4 Kemitraan 100%	4 Kemitraan	4 Kemitraan 100%

Penjelasan :

Indikator Pertama Persentase Realisasi pelaksanaan Kemitraan pada tahun 2022 tidak ada target sehingga tidak ada realisasi, sedangkan tahun 2022 ditargetkan 100% dan terealisasi 100% sehingga kinerja mencapai 100%

2022		2023	
Perusahaan Besar	UMKM	Perusahaan Besar	UMKM
Bagas Mualang, Lantan Wasnawati	Rina Novian Artiany, Barikit Sasirangan	Vendor Bagas Mualang, Lantan wasnawati	Jamilah Fanesya Sasirangan
Bagas Mualang, Lantan Wasnawati	Husni Panting, Pembuat Alat Tradisional/Panting Gamelan	BPD Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kalsel Dr Hj Rosally Gunawan	Jamilah Fanesya Sasirangan
Bagas Mualang, Lantan Wasnawati	Christian Ari Wibowo, Advertising & Event Organizer	Vendor Bagas Mualang, Lantan wasnawati	Kartinah Kerupuk dan Amplang Ikan Pipih Berdikari
Bagas Mualang, Lantan Wasnawati	Gilang Fitri Hermawan, Tambiyaku	Vendor Bagas Mualang, Lantan wasnawati	Fuad Hasan Sasirangan
Bagas Mualang, Lantan Wasnawati	Sri Samini, Serbuk Jahe, Kripik Singkong dan Loundry	BPD Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kalsel Dr Hj Rosally Gunawan	Fuad Hasan Sasirangan
Bagas Mualang, Lantan Wasnawati	Dedes Sekawaty Mulyati, Kitchen Dedes	Vendor Bagas Mualang, Lantan wasnawati	Rusimah Dodol Madu Kasirat Raisa
Bagas Mualang, Lantan Wasnawati	Hasni Panting, Pembuat Alat Tradisional / Panting Gamelan	Vendor Bagas Mualang, Lantan wasnawati	Esti Supto Rini Banana Smoke D'Jajanan

Bagas Mualang, Lantan Wasnawati		Vendor Bagas Mualang, Lantan wasnawati	Siti Jaleha Kue Kering Abon Ikan Tenggiri
		Vendor Bagas Mualang, Lantan wasnawati	Nur Ulfah Sasirangan Kotabaru Bubuhan Sasirangan Kreative

Indikator Persentase Potensi Investasi dipromosikan pada tahun 2022 tidak ada target sehingga tidak ada realisasi, sedangkan tahun 2022 ditargetkan 100% dan terealisasi 100% (19 Potensi) sehingga kinerja mencapai 100%

2022	2023
<ul style="list-style-type: none"> • Penggemukan dan Pembibitan Sapi Potong • Kawasan Industri Batulicin • Kawasan Industri Jorong • Aerocity Syamsuddin Noor • Pembangkit Listrik Bendungan Tapin 	<ul style="list-style-type: none"> • Cabe Hiyung • Ikan Gabus • PLTA Kusan Tanah Bumbu • Hotel Aerocity Banjarbaru • Pemotongan Hewan Modern Banjarbaru

Indikator Persentase Potensi Investasi yang berbasis Lingkungan pada tahun 2022 ditargetkan 20% dan terealisasi 20% sehingga kinerja mencapai 100%, sedangkan tahun 2023 ditargetkan 20% dan terealisasi 20% tersedianya 1 Dokumen potensi investasi berbasis lingkungan

2022	2023
<ul style="list-style-type: none"> • Energy Listrik Tenaga dan Biogas Surya Banjarmasin dan Banjarbaru • Energy Bayu Tanah Laut 	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Jejangkit Ecopark • Pulau Curiak Mangrove Riset Bekantan

Indikator Persentase Kesesuaian RUPM dengan Sektor Investasi tahun 2022 ditarget 100% terealisasi 100% sehingga kinerja mencapai 100%, sedangkan tahun 2023 ditarget 100% terealisasi 100% sehingga kinerja mencapai 100%

2022	2023
<ul style="list-style-type: none"> • Sektor Pariwisata • Sektor Pangan • Sektor Infrastruktur dan Sosial • Sektor Energi • Sektor Industri • Sektor Perdagangan • Sektor UMKM • Sektor Jasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Sektor Pariwisata • Sektor Pangan • Sektor Infrastruktur dan Sosial • Sektor Energi • Sektor Industri • Sektor Perdagangan • Sektor UMKM • Sektor Jasa

Indikator Jumlah Kemitraan dunia usaha tahun 2022 ditarget 100% terealisasi 100% sehingga kinerja mencapai 100%, sedangkan tahun 2023 ditarget 100% terealisasi 100% sehingga kinerja mencapai 100%

2022	2023
<ul style="list-style-type: none"> • Maria Ulfah : pengrajin anyaman • Maulidah : Jasa/salon/rias penganten • Masrukin : Kayu manis (minuman, serbuk, jahe merah) • Marliana : Kuliner / keripik tahu (Dapur Ulin 21) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dian Lia Ramayani : Dian Lia Sasirangan pewarna alam • Nurmaina Kuliner : pewarna alam kerupuk udang/haruan • Karlina kacang mandai • Sri ika apriliana : gallery skariliana

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya-upaya yang telah dilakukan

- Terlaksananya Kemitraan dunia usaha antara pengusaha besar dengan UMKM se Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan
- Melakukan Koordinasi dengan Kementerian Investasi/BKPM dan dengan Dinas PMPTSP Kabupaten/Kota se Kalsel mengenai potensi investasi di Provinsi Kalimantan Selatan

3.2 Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

- Minimnya data potensi investasi di Kabupaten/Kota yang ada di Kalsel
- Kurangnya keterlibatan dan pemahaman dari DPMPTSP Kabupaten/Kota terkait fasilitasi kemitraan UMKM dengan pengusaha besar
- Terbatasnya dana yang tersedia sehingga membuat terbatasnya kegiatan dan koordinasi dengan pusat maupun daerah

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Melakukan supervisi dan sosialisasi kepada Kabupaten/Kota tentang fasilitasi kemitraan dunia usaha
- Menambahkan anggaran untuk kegiatan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim PM
- Melakukan monitoring/evaluasi baik tentang pelaksanaan kemitraan maupun pelaksanaan kegiatan pemetaan potensi investasi di Kalimantan Selatan

4) Analisis Program/kegiatan Penunjang Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2023 :

1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- a) Penetapan Pemberian Fasilitas/Intensif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
- b) Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi

5. Esselon III (Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal)

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1	Peningkatan Calon Investor	Persentase Peningkatan Calon Investor	30%	30%	100%	Pertumbuhaa Calon Investor = (Jumlah calon investor tahun beqjalan dikurang jumlah calon investor tahun lalu) dibagi jumlah calon investor tahun lalu x 100%	Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel
		Persentase Promosi yang ditindaklanjuti	25%	25%	100%	Promosi yang ditindaklanjuti dibagi jumlah promosi an dilaksanakan x 100%	Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel
	Teridentifikasi Promosi Investasi	Jumlah Item Media Promosi Investasi	6 Item	6 Item	100%	Jumlah Item Media Promosi Investasi	Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Seminar Bisnis, Forum, One on One Meeting	3 Kali	3 Kali	100%	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Seminar Bisnis, Forum, One on One Meeting	Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel
	Terlaksananya Promosi Investasi	Persentase Potensi investasi daerah yang diminati	50%	50%	100%	Jumlah Potensi Investasi Daerah yang Diminati dibagi Jumlah Potensi Investasi yang Dipromosikan x 100%	Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel
		Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi	3 Kali	3 Kali	100%	Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi	Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel
Rata-rata Capaian					100,00%		

Penjelasan :

- Indikator Persentase peningkatan Calon Investor ditargetkan 100% terealisasi 100%

✓ PT TBL
✓ Tilaks
✓ PT Kaila Group

- | |
|--------------|
| ✓ PT Grieya |
| ✓ PT MSSF |
| ✓ PT Indraco |

- Indikator Persentase Promosi yang ditindaklanjuti di targetkan 25% terealisasi 25% yaitu :

- | | |
|----------------------------------|--|
| ✓ Cabe Hiyung Tapin | ✓ Waste to Energy |
| ✓ Ikan Gabus Hulu Sungai Selatan | ✓ Kawasan Industri Jorong |
| ✓ PLTA Kusan tanah Bumbu | ✓ Pemotongan Hewan dan Penggemukan Sapi di Batola |
| ✓ Hotel Aerocity Banjarbaru | ✓ Pemotongan Hewan dan Peternakan sapi di Tanah Laut |
| ✓ Pemotongan Hewan Banjarmasin | |

- Indikator Jumlah item media promosi ditargetkan 6 item terealisasi 6 item yaitu

- | |
|---------------|
| ✓ Brousur |
| ✓ Booklet |
| ✓ Buku |
| ✓ Video |
| ✓ IPRO Kajian |
| ✓ Rakor |

- Indikator Jumlah pelaksanaan kegiatan seminar bisnis, forum, one on meeting ditargetkan 3 kali terealisasi 3 kali yaitu

- ✓ Batam Tourism and Trade Investment Expo 2023
- ✓ Kalsel Expo 2023
- ✓ Bali ITTAF

- Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Seminar Bisnis, Forum, One on One Meeting

- ✓ High Level Meeting di Jakarta tanggal 2 Maret 2023
- ✓ High Level Meeting di Jakarta tanggal 15 Juni 2023
- ✓ High level Meeting

- Persentase potensi investasi daerah yang diminati

✓ Cabe Hiyung Tapin	✓ Waste to Energy
✓ Ikan Gabus Hulu Sungai Selatan	✓ Kawasan Industri Jorong
✓ PLTA Kusan tanah Bumbu	✓ Pemotongan Hewan dan Penggemukan Sapi di Batola
✓ Hotel Aerocity Banjarbaru	✓ Pemotongan Hewan dan Peternakan sapi di Tanah Laut
✓ Pemotongan Hewan Banjarmasin	

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

NO	INDIKATOR KINERJA	2022	2023		
		REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Persentase Peningkatan Calon Investor	30%	30%	30%	100%
2.	Persentase Promosi yang ditindaklanjuti	25%	25%	25%	100%
3	Jumlah Item Media Promosi Investasi	6 Item	6 Item	6 Item	100%
4	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Seminar Bisnis, Forum, One on One Meeting	3 Kali	3 Kali	3 Kali	100%
5	Persentase Potensi investasi daerah yang diminati	50%	50%	50%	100%
6	Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi	3 Kali	3 Kali	3 Kali	100%

Penjelasan :

Indikator Persentase peningkatan calon investor Tahun 2022 di targetkan 30% terealisasi 30% sehingga capaian 100% sedangkan Tahun 2023 di targetkan 30% terealisasi 30% sehingga capaian 100%.

2022	2023
<ul style="list-style-type: none"> ✓ PT Qinfa Mining Industri ✓ PT Pelsart Tambang Kencana ✓ PT Jhonlin Group ✓ Egypt Mediteranean Service 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PT Grieya Sharia Hospitality ✓ PT MSSF ✓ PT Indraco ✓ PT TBL ✓ Tilaks ✓ PT Kalla Group

Indikator Persentase Promosi yang ditindaklanjuti Tahun 2022 di targetkan 30% terealisasi 30% sehingga capaian 100% sedangkan Tahun 2023 di targetkan 30% terealisasi 30% sehingga capaian 100%.

2022	2023
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peternakan dan penggemukan sapi potong ✓ Waste to Energy TPA Basirih ✓ Pusat Distribusi Regional Baiman ✓ Sektor Pertanian ✓ Kawasan Industri Jorong 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cabe Hiyung Tapin ✓ Ikan Gabus Hulu Sungai Selatan ✓ PLTA Kusan Tanah Bumbu ✓ Hotel Aerocity Banjarbaru ✓ Pemotongan Hewan Modern ✓ Waste to Energy Basirih ✓ Kawasan Industri Jorong ✓ Pembuatan Hewan dan Penggemukan sapi di Batola ✓ Pembuatan Hewan dan peternakan sapi di Tanah Laut

Indikator Jumlah item Media promosi investasi Tahun 2022 di targetkan 6 item terealisasi 6 item sehingga capaian 100% sedangkan Tahun 2023 di targetkan 6 item terealisasi 6 item sehingga capaian 100%.

2022	2023
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Buku ✓ Booklet ✓ Spanduk ✓ Brosur ✓ Video ✓ Baliho 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Brousur ✓ Booklet ✓ Buku ✓ Video ✓ IPRO Kajian ✓ Rakor

Indikator Jumlah pelaksanaan kegiatan seminar bisnis, forum, one on meeting di targetkan 3 kali terealisasi 3 kali sehingga capaian 100% sedangkan Tahun 2023 di targetkan 3 kali terealisasi sehingga capaian 100%.

2022	2023
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Seminar Bisnis mengenai promosi potensi investasi daerah melalui mekanisme video ✓ Seminar Bisnis Penilaian Potensi ✓ Rapat Koordinasi mengenai tindaklanjut potensi investasi yang sudah ada masuk dalam kategori IPRO 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ High Level Meeting di Jakarta ✓ High Level Meeting di Jakarta ✓ High Level Meeting di Banjarmasin

Indikator Persentase potensi investasi daerah yang diminati di targetkan 50% terealisasi 50% sehingga capaian 100% sedangkan Tahun 2023 di targetkan 50% terealisasi 50% sehingga capaian 100%.

2022	2023
<ul style="list-style-type: none"> ✓ PLTA Tapin ✓ Floating Market ✓ Kawasan Pariwisata Riam Kanan ✓ Aero City ✓ Sport City ✓ KEK Loksado ✓ Geopark Pegunungan Meratus ✓ PLTA Kusan ✓ KL Batulicin ✓ KL Jorong 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cabe Hiyung Tapin ✓ Ikan Gabus Hulu Sungai Selatan ✓ PLTA Kusan Tanah Bumbu ✓ Hotel Aerocity Banjarbaru ✓ Pemotongan Hewan Modern ✓ Waste to Energy Basirih ✓ Kawasan Industri Jorong ✓ Pembuatan Hewan dan Penggemukan sapi di Batola ✓ Pembuatan Hewan dan peternakan sapi di Tanah Laut

Indikator Jumlah pelaksanaan promosi investasi di targetkan 3 kali terealisasi 3 kali sehingga capaian 100% sedangkan Tahun 2023 di targetkan 3 kali terealisasi 3 kali sehingga capaian 100%.

2022	2023
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pameran Indonesia ekonomi kreatif expo Tahun 2022 di labuan Bajo ✓ Pekan promosi investasi daerah Tahun 2022 di Jawa Tengah Semarang ✓ Penyelenggaran Pameran “ Jogja Craft Indo 2022 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Batam Tourism and Trade Investment Expo 2023 ✓ Kalsel Expo 2023 ✓ Bali ITTAF

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022 dan % capaian	Target 2023	Realisasi 2023 dan % capaian
1.	Persentase Peningkatan Calon Investor	30%	30% 100%	30%	30% 100%
2	Persentase Promosi yang ditindaklanjuti	25%	25% 100%	25%	25% 100%
3	Jumlah Item Media Promosi Investasi	6 Item	6 Item 100%	6 Item	6 Item 100%
4	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Seminar Bisnis, Forum, One on One Meeting	3 Kali	3 Kali 100%	3 Kali	3 Kali 100%
5	Persentase Potensi investasi daerah yang diminati	50%	50% 100%	50%	50% 100%
6	Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi	3 Kali	3 Kali 100%	3 Kali	3 Kali 100%

Penjelasan :

Persentase Peningkatan Calon Investor ditargetkan **30%** terealisasi **30%** sehingga kinerja mencapai **100%**

Persentase Promosi yang ditindaklanjuti ditargetkan **25%** terealisasi **25%** sehingga kinerja mencapai **100%**

Jumlah Item Media Promosi Investasi ditargetkan **6 item** terealisasi **6 item** sehingga kinerja mencapai **100%**

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Seminar Bisnis, Forum, One on One Meeting ditargetkan **3 Kali** terealisasi 3 Kali sehingga kinerja mencapai **100%**.

Persentase Potensi investasi daerah yang diminati ditargetkan **50%** terealisasi 50% sehingga kinerja mencapai **100%**.

Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi ditargetkan **3 Kali** terealisasi 3 Kali sehingga kinerja mencapai **100%**.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya-upaya yang telah dilakukan

- Melaksanakan pameran, media promosi investasi dan melaksanakan seminar bisnis, forum, one on one meeting
- Meningkatkan kapasitas potensi menjadi ready to offer
- Menyamakan persepsi Kab/Kota terhadap potensi yang potensial untuk dipromosikan dan juga menyamakan persepsi indikator potensi yang ready to offer

3.2 Hambatan dalam mencapai Kinerja

- SDM yang memiliki kapabilitas memadai
- Pelatihan untuk peningkatan kualitas SDM masih terbatas
- Alokasi anggaran yang masih terbatas

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti pelatihan
- Peningkatan urusan alokasi anggaran
- Pelaksanaan promosi investasi agar ditambah kegiatannya agar bias menarik calon investor baik dari penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing.

6. Esselon III (Kepala Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal)

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI BULAN INI	% CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Permasalahan Perusahaan yang Terselesaikan	100,00%	100,00%	100,00%	Jumlah Perusahaan yang aktif (diawasi/diamati/diketahui) dibagi jumlah Perusahaan Penanaman Modal yang ada di Kalsel x 100%	Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel (Data diambil sendiri / lapangan dan Rekon)
		Persentase Perusahaan yang Aktif dalam Investasinya	35,00%	35,70%	102,00%	Jumlah penyelesaian permasalahan perusahaan dibagi jumlah permasalahan perusahaan x 100%	Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel (Data diambil sendiri / lapangan dan Rekon)
		Persentase Kabupaten/ Kota yang mencapai target	55.00%			Jumlah Kabupaten/Kota yang Investasi Provinsi dibagi 13 Memenuhi Target Kabupaten/Kota x 100%	Dinas PM dan PTSP
	Pengawasan PM	Jumlah Perusahaan PM yang lancar melaksanakan kegiatannya (sesuai target investasi perusahaan)	300 Perusahaan	350 Perusahaan	110%	Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM dengan valid dan tepat waktu	Dinas PM dan PTSP
		Laporan Realisasi Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Laporan Realisasi Penanaman Modal	Dinas PM dan PTSP
	Pembinaan PM	Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM	400 Perusahaan	410 Perusahaan	102.50%	Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM	Dinas PM dan PTSP

		dengan valid tepat waktu					
		Persentase Kabupaten/Kota yang telah mengimplementasikan Kebijakan penanaman Modal terbaru	100%	100%	100%	Jumlah Kabupaten/Kota yang telah mengimplementasikan Kebijakan penanaman Modal x 100%	Dinas PM dan PTSP
Rata-rata Capaian					100,10%		

Penjelasan :

- 1) Indikator persentase permasalahan perusahaan yang terselesaikan adalah sebesar 100% yaitu 49 Perusahaan yang terdata dan yang telah diselesaikan, berdasarkan data pers rilis yang berdasarkan hasil tindak lanjut perusahaan
- 2) Indikator persentase perusahaan yang aktif dalam investasinya yaitu hingga bulan ini 410 perusahaan (41.00%), berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan secara tatap muka/online
- 3) **Persentase kabupaten/Kota yang mencapai target yaitu yang mencapai target Tahun 2023 46.19 % :**
 - Kabupaten Tabalong
 - Kabupaten Banjar
 - Kota Banjarmasin
 - Kabupaten Tanah Bumbu
 - Kabupaten Tapin
- 4) Jumlah Perusahaan PM yang lancer melaksanakan kegiatannya (sesuai target investasi Perusahaan) yaitu 330 Perusahaan
- 5) Laporan Realisasi penanaman modal yaitu 1 dokumen tersedianya dokumen realisasi investasi penanaman modal
- 6) Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM dengan valid dan tepat waktu yaitu 410 Perusahaam

Kinerja eselon III rata-rata capaian adalah **102,90%** dengan klarifikasi **Sangat Memuaskan**, dengan 7 (tujuh) indikator

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

NO	INDIKATOR KINERJA	2022	2023		
		REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Persentase Permasalahan Perusahaan yang terselesaikan	100.00%	100%	100.00%	100.00%
2.	Persentase Perusahaan yang aktif dalam investasinya	35.70%	35%	41.00%	117.14%
3.	Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai target	55.00%	55%	46.15%	92.31%
4	Jumlah Perusahaan PM yang lancar melaksanakannya (sesuai target investasi perusahaan)	330 Perusahaan	300 Perusahaan	330 Perusahaan	110.00%
5	Laporan Realisasi Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%
6	Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM dengan valid tepat waktu	410 Perusahaan	400 Perusahaan	410 Perusahaan	102.50%
7	Persentase Kabupaten/Kota yang telah mengimplementasikan Kebijakan penanaman Modal terbaru	100%	100%	100%	100%

Penjelasan :

Indikator Persentase Permasalahan Perusahaan yang terselesaikan pada tahun 2020 ditargetkan 50% dan terealisasi **100%**, sehingga kinerja mencapai **200,00%**, sedangkan tahun 2021 ditargetkan **100%** dan teralisasi **100%** sehingga kinerja mencapai **100%**

Indikator persentase perusahaan yang aktif dalam investasinya pada tahun 2020 ditargetkan **24%** dan terealisasi **25.76%** sehingga kinerja mencapai **107.33%**. sedangkan tahun 2020 ditargetkan **30%** dan terealisasi **32.40%** sehingga kinerja mencapai **108.00%**

Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai target pada tahun 2020 tidak ada target pada tahun itu, sedangkan tahun 2021 ditargetkan **50%** dan terealisasi **46.15%** sehingga kinerja mencapai **92.31%**

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022 dan % capaian	Target 2023	Realisasi 2023 dan % capaian
1	Persentase Permasalahan Perusahaan yang terselesaikan	100%	100.00% 100,00%	100%	100.00% 100,00%
2	Persentase Perusahaan yang aktif dalam investasinya	35.00%	35.70% 102.00%	30%	41.00% 117.14%
3.	Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai target	55.00	55.00% 100%	55.00	55.00% 100%
4	Jumlah Perusahaan PM yang lancar melaksanakan kegiatannya (sesuai target investasi perusahaan)	300 Perusahaan	330 Perusahaan 110%	300 Perusahaan	330 Perusahaan 110%
5	Laporan Realisasi Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen 100%	1 Dokumen	1 Dokumen 100%
6	Persentase Kabupaten/Kota yang telah mengimplementasikan Kebijakan penanaman Modal terbaru	400 Perusahaan	410 Perusahaan 102.5%	400 Perusahaan	410 Perusahaan 102.5%

Penjelasan :

Indikator Persentase Permasalahan Perusahaan yang terselesaikan pada tahun 2022 ditargetkan 100% dan terealisasi **100%**, sehingga kinerja mencapai **100,00%**, sedangkan tahun 2023 ditargetkan **100%** dan teralisasi **100%** sehingga kinerja mencapai **100%**

Indikator persentase perusahaan yang aktif dalam investasinya pada tahun 2022 ditargetkan **35%** dan terealisasi **35.70%** sehingga kinerja mencapai **102.00%**. sedangkan tahun 2023 ditargetkan **35%** dan terealisasi **41.00%** sehingga kinerja mencapai **117.14%**

Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai target pada tahun 2022 ditargetkan 55% terealisasi 55.00% sehingga kinerja mencapai 100.00%, sedangkan tahun 2023 ditargetkan **55%** dan terealisasi **55.00%** sehingga kinerja mencapai **100%**

Indikator Jumlah Perusahaan PM yang lancar melaksanakan kegiatannya (sesuai target Perusahaan) ditargetkan 300 Perusahaan terealisasi 330 Perusahaan sehingga kinerja mencapai 110.00%, sedangkan Tahun 2023 ditargetkan 300 Perusahaan terealisasi 330 Perusahaan sehingga kinerja mencapai 110.00%,

Indikator Laporan Realisasi Penanaman Modal Tahun 2022 ditargetkan 1 dokumen terealisasi 1 Dokumen sehingga kinerja mencapai 100%, sedangkan Tahun 2023 ditargetkan 1 dokumen terealisasi 1 Dokumen sehingga kinerja mencapai 100%.

Indikator Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM dengan valid dan tepat waktu Tahun 2022 ditargetkan 400 Perusahaan terealisasi 410 Perusahaan sehingga kinerja mencapai 102.50%, sedangkan Tahun 2023 ditargetkan 400 Perusahaan terealisasi 410 Perusahaan sehingga kinerja mencapai 102.50%

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya-upaya yang telah dilakukan

- Membagi PIC untuk Kab/Kota dalam mengkoordinasi target investasi , perusahaan-perusahaan dan pelatihan LKPM
- Mengirimkan email sebagai pengingat/reminder penyampaian LKPM per triwulan
- Melakukan pembinaan/pelatihan LKPM kepada perusahaan melalui telepon/WA
- Melakukan fasilitasi permasalahan perusahaan melalui zoom meeting

3.2 Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

- Kurangnya kesadaran perusahaan untuk melaporkan LKPM
- Adanya perubahan system dari oss 1.1 ke oss RBA, sehingga mengalami kendala untuk menarik data rencana investasi perusahaan
- Kurang maksimalnya Kab/Kota dalam mengejar target investasi masing-masing yang telah diberikan
- Adanya pergantian/mutasi jabatan di DPMPSTSP Kab/Kota sehingga kesulitan untuk melakukan koordinasi

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Melakukan koordinasidengan PIC dimasing-masing Kab/Kota terkait pencapaian realisasi investasi untuk TA 2022
- Melaksanakan fasilitasi permasalahan yang dialami perusahaan bersama satgas percepatan pelaksanaan berusaha Prov Kalsel
- Melaksanakan Bimteks OSS RBA dan Bimtek impelemntasi pengawasan perizinan berubah
- Melakukan kerjasama dengan bidang perizinan untuk pendataan rencana investasi perusahaan penanaman modal.

4) Analisis Program/kegiatan Penunjang Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2021:

- 1) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan kegiatan:
 - a) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan

7. Esselon III (Kepala Bidang Perizinan infrastruktur dan Sosial)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial	A (88.50)	A (90.25)	101.98%	Nilai IKM Bidang Infrastruktur dan Sosial	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
		Persentase Permohonan yang dilayani Bidang Infrastruktur dan Sosial	100,00%	100,00%	100,00%	Jumlah Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial sesuai SOP dibagi Jumlah Perizinan yang dimohonkan masyarakat x 100%	Dinas PM dan PTSP Prov kalsel
		Persentase Usaha Berizin	90%	99.65	110.72%	Jumlah Usaha Berizin dibagi jumlah usaha x 100%	Dinas PM dan PTSP Prov kalsel
		Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial yang dapat diproses	100,00%	100,00%	100,00%	Jumlah Perizinan yang dapat diproses sesuai standar dibagi Jumlah Perizinan yang dimohonkan masyarakat x100%	Dinas PM dan PTSP Prov kalsel
		Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial yang dilayani	55 Jenis Izin	55 Jenis Izin	100,00%	Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Nonpeiznan BidangInfrastruktur dan Sosial yang dilayani	Dinas PM dan PTSP Prov kalsel
Rata-rata Capaian					102,54%		

Penjelasan :

- a. Nilai IKM pelayanan perizinan dan non perizinan infrastruktur dan sosial dari data analisa survey indeks kepuasan masyarakat di DPMPTSP Prov Kalsel untuk bidang perizinan sarana perekonomian dan sosial yaitu dengan nilai IKM 90.25 kategori (sangat baik) sebanyak 377 Responden
- b. Indikator persentase permohonan yang dilayani yaitu pelayanan perizinan bidang infrastruktur dan sosial telah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Semua permohonan perizinan dan non perizinan yang masuk dilaksanakan sesuai target waktu dan persyaratan perizinan dan non perizinan yang ada pada SOP, dimana permohonan yang masuk seluruhnya dipenuhi tanpa ada penundaan atau

penolakan. Permohonan yang masuk sebanyak 287 berkas dan dilaksanakan sejumlah 287 berkas sehingga terealisasi capaian 100%.

- c. Indikator Persentase usaha berizin bidang Infrastruktur dan sosial yaitu 99.65%
- d. Indikator Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial yang dapat diproses yaitu 100%
- e. Indikator Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial yang dilayani yaitu 55 jenis izin

Kinerja eselon III rata-rata capaian adalah 102,54% dengan klarifikasi **sangat memuaskan**, dengan 5 (lima) indikator

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

NO	INDIKATOR KINERJA	2022	2023		
		REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial	A (89,84)	A (88.50)	A (90.25)	101,98%
2.	Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur yang dapat diproses	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase Permohonan yang dilayani Bidang Infrastruktur dan sosial	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase Usaha Berizin Bidang Infrastruktur dan sosial	99.19%	90%	99.65%	110.72%
5.	Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur	55 Jenis Izin	55 Jenis Izin	100%	100%

	dan Sosial yang dilayani				
--	--------------------------	--	--	--	--

Penjelasan :

Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial tahun 2022 ditargetkan B dengan nilai 88.25 dan terealisasi **A dengan nilai 89,44** sehingga kinerja mencapai 99.43% dari 93 responden, sedangkan tahun 2023 ditargetkan A dengan nilai 88.50 dan terealisasi **A dengan nilai 90,25** sehingga kinerja mencapai 106,70% dari 377 responden

Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial sesuai SOP Tahun 2022 ditargetkan 100% dan terealisasi **100%**, yaitu dimana permohonan yang masuk seluruhnya dipenuhi tanpa ada penundaan atau penolakan. Permohonan yang masuk sebanyak 257 berkas dan dilaksanakan sejumlah 257 berkas sehingga terealisasi capaian 100%, sedangkan tahun 2023 ditargetkan 100% dan terealisasi **100%** dimana permohonan yang masuk seluruhnya dipenuhi tanpa ada penundaan atau penolakan. Permohonan yang masuk sebanyak 377 berkas

Persentase Usaha Berizin tahun 2022 ditargetkan pada tahun itu, sedangkan tahun 2023 terealisasi 99.19% dengan capaian 110.21% terdiri dari 10.823 izin dari 10.911 usaha, sedangkan tahun 2023 ditargetkan 90.00% terealisasi 99.65% dengan capaian 110.72%.

Persentase pemenuhan pelayanan (Dokumen Permohonan) perizinan dan non perizinan bidang infrastruktur dan sosial yang dapat diproses yaitu ditargetkan 100% terealisasi 100% dengan capaian 100%, sedangkan tahun 2023 ditargetkan 100% terealisasi 100% dengan capaian 100%

Jumlah jenis layanan perizinan dan non perizinan bidang infrastruktur dan sosial ditargetkan 55 Jenis izin terealisasi 55 Jenis izin dengan capaian 100%, sedangkan tahun 2023 ditargetkan 55 Jenis izin terealisasi 55 Jenis izin dengan capaian 100%.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022 dan % capaian	Target 2023	Realisasi 2023 dan % capaian
1.	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial	B (88.25)	A (87.75) 99.43%	A (88.50)	A (90.25) 101.98%
2.	Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur yang dapat diproses	100%	100% 100%	100%	100% 100%
3.	Persentase Permohonan yang dilayani Bidang Infrastruktur dan sosial	100%	100%	100%	100% 100%
4.	Persentase Usaha Berizin Bidang Infrastruktur dan sosial	90%	99.19% 110.21%	90%	99.19 110.72%
5.	Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial yang dilayani	55 Jenis Izin	55 Jenis Izin 100%	55 Jenis Izin	55 Jenis Izin 100%

Penjelasan :

Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial tahun 2022 ditargetkan B dengan nilai 88.25 dan terealisasi **A dengan nilai 89,44** sehingga kinerja mencapai 99.43% dari 93 responden, sedangkan tahun 2023 ditargetkan A dengan nilai 88.50 dan terealisasi **A dengan nilai 90,25** sehingga kinerja mencapai 106,70% dari 377 responden

Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial sesuai SOP Tahun 2022 ditargetkan 100% dan terealisasi **100%**, yaitu dimana permohonan yang masuk seluruhnya dipenuhi tanpa ada penundaan atau penolakan. Permohonan yang masuk

sebanyak 257 berkas dan dilaksanakan sejumlah 257 berkas sehingga terealisasi capaian 100%, sedangkan tahun 2023 ditargetkan 100% dan terealisasi **100%** dimana permohonan yang masuk seluruhnya dipenuhi tanpa ada penundaan atau penolakan. Permohonan yang masuk sebanyak 377 berkas

Persentase Usaha Berizin tahun 2022 ditargetkan pada tahun itu, sedangkan tahun 2023 terealisasi 99.19% dengan capaian 110.21% terdiri dari 10.823 izin dari 10.911 usaha, sedangkan tahun 2023 ditargetkan 90.00% terealisasi 99.65% dengan capaian 110.72%.

Persentase pemenuhan pelayanan (Dokumen Permohonan) perizinan dan non perizinan bidang infrastruktur dan sosial yang dapat diproses yaitu ditargetkan 100% terealisasi 100% dengan capaian 100%, sedangkan tahun 2023 ditargetkan 100% terealisasi 100% dengan capaian 100%

Jumlah jenis layanan perizinan dan non perizinan bidang infrastruktur dan sosial ditargetkan 55 Jenis izin terealisasi 55 Jenis izin dengan capaian 100%, sedangkan tahun 2023 ditargetkan 55 Jenis izin terealisasi 55 Jenis izin dengan capaian 100%.

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya-upaya yang telah dilakukan

- Melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan pada bidang perizinan infrastruktur dan social sesuai ketentuan
- Melaksanakan kegiatan sosialisasi
- Melaksanakan rapat dan koordinasi dengan Instansi teknis terkait

3.2 Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

- Perizinan yang melalui OSS masih proses penyempurnaan
- SDM OPD teknis/mitra kerja kurang memahami OSS RBA

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Mengikuti TOT dan Sosialisasi untuk penyempurnaan OSS RBA menunggu pusat sambil berjalan

4) Analisis Program/kegiatan Penunjang Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program yang dilaksanakan selama tahun 2021 yakni: Program Pelayanan penanaman Modal kegiatan .

- a. Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

8. Esselon III (Kepala Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	A (88.50)	A (97,75)	110,45%	Nilai IKM Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
		Persentase Permohonan Perizinan yang dilayani Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	100,00%	100,00%	100,00%	Jumlah Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang dilayani dibagi Jumlah Perizinan yang dimohonkan masyarakat x 100%	Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel
		Persentase Usaha Berizin Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	90%	99.88%	110.98%	Jumlah Usaha Berizin dibagi jumlah usaha x 100%	Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel
		Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial yang dapat diproses Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	100,00%	100,00%	100,00%	Jumlah Perizinan yang dapat diproses sesuai standar dibagi Jumlah Perizinan yang dimohonkan masyarakat x100%	Dinas PM dan PTSP Prov kalsel
		Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial yang dilayani Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	90 Jenis Izin	90 Jenis Izin	100,00%	Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Nonpeiznan BidangInfrastruktur dan Sosial yang dilayani	Dinas PM dan PTSP Prov kalsel
Rata-rata Capaian					104,29%		

Penjelasan

- Nilai IKM pelayanan perizinan dan non perizinan bidang Ekonomi dan Sumber daya alam dari data analisa survey indeks kepuasan masyarakat di DPMPSTSP Prov Kalsel untuk bidang Produksi dan Industri sebanyak 732 responden yaitu dengan nilai IKM 97.75 kategori (sangat baik)
- Indikator Persentase Permohonan Perizinan yang dilayani yaitu pelayanan perizinan bidang Ekonomi dan sumber daya alam telah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Semua permohonan perizinan dan non perizinan

yang masuk dilaksanakan sesuai target waktu dan persyaratan perizinan dan non perizinan yang ada pada SOP, dimana permohonan yang masuk seluruhnya dipenuhi tanpa ada penundaan atau penolakan. Permohonan yang masuk sebanyak 831 berkas dan dilaksanakan sejumlah 831 berkas sehingga terealisasi capaian 100%.

Kinerja eselon III rata-rata capaian adalah 104,29% dengan klarifikasi **sangat memuaskan**, dengan 5 (lima) indikator

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

NO	INDIKATOR KINERJA	2022	2023		
		REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	A (88.50)	A (88.50)	A (97,75)	110,45%
2.	Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sesuai SOP	100%	100,00%	100,00%	100,00%
3.	Persentase Permohonan Perizinan yang dilayani	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase Usaha Berizin	99.88%	90%	99.88%	110.98%
5.	Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang dilayani	90 Jenis Izin	90 Jenis Izin	90 Jenis Izin	100,00%

Penjelasan :

Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya tahun 2022 ditargetkan A dengan nilai 88.25 dan terealisasi A dengan nilai 88.50 sehingga kinerja mencapai 100,28% yaitu sebanyak 319 responden. Sedangkan tahun 2023 ditargetkan A dengan nilai 88.50 dan terealisasi A dengan nilai 97.75 sehingga kinerja mencapai 110.45% yaitu sebanyak 732 responden

Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sesuai SOP Tahun 2022 ditargetkan 100% dan terealisasi **100%**, yaitu dimana permohonan yang masuk seluruhnya dipenuhi tanpa ada penundaan atau penolakan. Permohonan yang masuk sebanyak 319 berkas dan dilaksanakan sejumlah 319 berkas sehingga terealisasi capaian 100%, sedangkan tahun 2023 Tahun 2022 ditargetkan 100% dan terealisasi **100%**, yaitu dimana permohonan yang masuk seluruhnya dipenuhi tanpa ada penundaan atau penolakan. Permohonan yang masuk sebanyak 732 berkas dan dilaksanakan sejumlah 732 berkas sehingga terealisasi capaian 100%,

Persentase Permohonan Perizinan yang dilayani ditargetkan 100% dan terealisasi **100%**, yaitu dimana permohonan yang masuk seluruhnya dipenuhi tanpa ada penundaan atau penolakan. Permohonan yang masuk sebanyak 831 berkas dan dilaksanakan sejumlah 831 berkas sehingga terealisasi capaian 100%

Persentase usaha berizin ditargetkan 90% dan terealisasi **99.88%**, yaitu dimana izin terbit dibagi jumlah permohonan (usaha yang ada) terdiri sehingga terealisasi capaian 110.98%

Persentase pemenuhan pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yaitu 100% total berkas masuk 831 dan diproses sebanyak 831 dokumen permohonan bidang peternakan, dokumen permohonan bidang kehutanan, dan dokumen permohonan bidang energi sumber daya alam

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022 dan % capaian	Target 2023	Realisasi 2023 dan % capaian
1.	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	A (88.25)	A (88.50) 100,28%	A (88.50)	A (97.75) 110.45%
2.	Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sesuai	100%	100% 100%	100%	100% 100%

	SOP				
3.	Persentase Permohonan Perizinan yang dilayani	100%	100% 100%	100%	100% 100%
4.	Persentase Usaha Berizin	90%	99.88% 110.98%	90%	99.88% 110.98%
5.	Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang dilayani	55 Jenis Izin	55 Jenis Izin 100%	55 Jenis Izin	55 Jenis Izin 100%

Penjelasan :

Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya tahun 2022 ditargetkan A dengan nilai 88.25 dan terealisasi A dengan nilai 88.50 sehingga kinerja mencapai 100,28% yaitu sebanyak 319 responden. Sedangkan tahun 2023 ditargetkan A dengan nilai 88.50 dan terealisasi A dengan nilai 97.75 sehingga kinerja mencapai 110.45% yaitu sebanyak 732 responden

Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sesuai SOP Tahun 2022 ditargetkan 100% dan terealisasi **100%**, yaitu dimana permohonan yang masuk seluruhnya dipenuhi tanpa ada penundaan atau penolakan. Permohonan yang masuk sebanyak 319 berkas dan dilaksanakan sejumlah 319 berkas sehingga terealisasi capaian 100%, sedangkan tahun 2023 Tahun 2022 ditargetkan 100% dan terealisasi **100%**, yaitu dimana permohonan yang masuk seluruhnya dipenuhi tanpa ada penundaan atau penolakan. Permohonan yang masuk sebanyak 732 berkas dan dilaksanakan sejumlah 732 berkas sehingga terealisasi capaian 100%,

Persentase Permohonan Perizinan yang dilayani ditargetkan 100% dan terealisasi **100%**, yaitu dimana permohonan yang masuk seluruhnya dipenuhi tanpa ada penundaan atau penolakan. Permohonan yang masuk sebanyak 831 berkas dan dilaksanakan sejumlah 831 berkas sehingga terealisasi capaian 100%

Persentase usaha berizin ditargetkan 90% dan terealisasi **99.88%**, yaitu dimana izin terbit dibagi jumlah permohonan (usaha yang ada) terdiri sehingga terealisasi capaian 110.98%

Persentase pemenuhan pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yaitu 100% total berkas masuk 831 dan diproses sebanyak 831 dokumen permohonan bidang peternakan, dokumen permohonan bidang kehutanan, dan dokumen permohonan bidang energi sumber daya alam

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya-upaya yang telah dilakukan

- Pelaksanaan gerai perizinan
- Peninjauan Lapangan
- Koordinasi yang intens dengan Tim teknis
- Konsultasi dan konsolidasi ke Kemnterian Pusat di Jakarta

3.2 Hambatan dan Pencapaian Kinerja

- Banyak pelaku usaha / pemohon ijin yang belum paham tentang OSS RBA
- Kurangnya sosialisasi tentang OSS RBA
- OSS RBA terus berkembang baik itu fitur maupun menu-menunya
- Jaringan yang tidak mendukung
- SDM yang belum ada bekal ilmu yang cukup tentang OSS RBA
- DPMPTSP, Tim Teknis juga masih tahap belajar / mempelajari system OSS RBA
- Masih banyak aplikasi diluar OSS yang dpakai contoh : Dinas perindustrian Aplikasi SINAS, Dinas Kelautan dan Perikanan Aplikasi SIMKADA, BPN Prov Kalsel aplikasi GISTARU
- Adanya dinas teknis tidak tahu adanya kewenangan Provinsi
- Ada beberapa Dinas teknis yang belum mempunyai SOP

3.3 Rencana Tindak lanjut

- Adanya sosialisasi dari Pemerintah Pusat ke daerah tentang OSS RBA
- SDM yang tersedia sudah paham tentang OSS RBA
- Adanya sosialisasi tentang OSS RBA ke pelaku usaha /pemohon lain

4) Analisis Program/kegiatan Penunjang Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program yang dilaksanakan selama tahun 2023, yakni: Program Pelayanan Penanaman Modal dan kegiatan :

- a) Penanaman Modal yang MENURUT Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

9. Esselon III (Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi)

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1	Pelayanan Pengaduan dan Informasi	Nilai IKM penanganan (pelayanan) Pengaduan	A (88.50)	A (88.53)	100.03%	Nilai IKM penanganan (pelayanan) Pengaduan	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2.	Pelayanan Data dan Sistem Informasi	Jumlah Sistem Informasi yang Berjalan dengan Lancar dan Data Informasi yang Update	3 Sistem	3 Sistem	100%	Jumlah Sistem Informasi yang berjalan Dinas PM dan PTSP dengan lancar dan Data Informasi yang Update	Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel
3.	Pelayanan Pengaduan	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan x 100%	Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel
		Persentase Pemenuhan pelayanan investor	100%	100%	100%	Pelaksanaan misi dibagi misi yang masuk x 100%	Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Konsultasi	100%	100%	100%	Tersedianya data perizinan dan non perizinan Penanaman Modal	Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel
Rata-rata Capaian					100,01%		

Penjelasan :

- a. Nilai IKM pelayanan perizinan dan non perizinan bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi dari data analisa survey indeks kepuasan masyarakat di DPMPTSP Prov Kalsel untuk bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi sebanyak 31 responden yaitu dengan nilai IKM 88.53 kategori (baik)
- b. Jumlah sistem informasi yang berjalan dengan lancar ditargetkan 3 sistem yaitu Web, SIMAPAN, Social Media
- c. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti ditargetkan 100% yaitu
 - Whastup (30)
 - Email 1

Total Pengaduan yang ditindaklanjuti sebanyak 31 pengaduan dan diselesaikan sebanyak 31 (100%)
- d. Persentase pemenuhan pelayanan investor ditargetkan 100 % yaitu
 - PT Wijaya Triutama Banjarmasin
 - PT Rajawali Nusindo Banjarmasin
 - PT Sari Buana Lestari Banjarmasin

- PT Cakra Perkara Jaya Mulia Tabalong'
- PT Mulia Jaya Tabalong
- PT Ananda Rizki Tabalong
- PT Banua Anugrah Sejahtera Kabupaten Banjar
- CV Kuat Perkasa Abadi

e. Persentase Pemenuhan Pelayanan Konsultasi ditargetkan yaitu 100%

✓ Online (15)

✓ Tatap Muka (1.046)

Kinerja eselon III rata-rata capaian adalah 100.01% dengan klarifikasi **sangat memuaskan**, dengan 5 (lima) indikator

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

NO	INDIKATOR KINERJA	2022	2023		
		REALISASI	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Nilai IKM penanganan (pelayanan) Pengaduan	A (88.25)	A (88.50)	A (88.53)	100.03%
2.	Jumlah Sistem Informasi yang Berjalan dengan Lancar dan Data Informasi yang Update	2 Sistem	3 Sistem	3 Sistem	100%
3.	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase Pemenuhan pelayanan Investor	100%	100%	100%	100%
5.	Persentase Pemenuhan Pelayanan Konsultasi	100%	100%	100%	100%

Penjelasan :

- Nilai IKM pelayanan perizinan dan non perizinan bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi dari data analisa survey indeks kepuasan masyarakat di DPMPTSP Prov Kalsel untuk bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi Tahun 2022 sebanyak 10 responden yaitu dengan nilai IKM 86.25 kategori (sangat baik), sedangkan Tahun 2023 yaitu dengan nilai IKM 88.53 kategori (sangat baik), sebanyak 31 Responden.

- Jumlah sistem informasi yang berjalan dengan lancar dan data informasi yang update yaitu

2022	2023
<ul style="list-style-type: none"> ✓ WEB ✓ SIMAPAN 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ WEB ✓ SIMAPAN ✓ Social Media

- Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti yaitu Tahun 2022 42 Pengaduan (100%), sedangkan tahun 2023 ada 31 pengaduan dan diselesaikan

2022	2023
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Whatsup Pengaduan (38) ✓ Email (2) ✓ SIMAPAN (2) <p>Total 42 Pengaduan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Whatsup Pengaduan (30) ✓ Email (1) <p>Total 31 Pengaduan</p>

- Persentase Pemenuhan Pelayanan Investor Tahun 2022 100% yaitu

2022	2023
<ul style="list-style-type: none"> ✓ CV Fatiya Mandiri Kabupaten Tabalong ✓ CV Rizky Jaya Abadi Kabupaten Tanah Bumbu 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PT Wijaya Triutama Banjarmasin ✓ PT Rajawali Nusindo Banjarmasin ✓ PT Sari Buana Lestari Banjarmasin ✓ PT Cakra Perkara Jaya Mulia Tabalong ✓ PT Mulia Jaya Tabalong ✓ PT Ananda Rizqi Tabalong ✓ PT Banua Anugrah Sejahtera Kabupaten Banjar ✓ CV Kuat Perkasa Abadi

- Persentase pemenuhan Konsultasi yaitu 100%

2022	2023
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Chatbox (6) Total Pelayanan Konsultasi 6	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Online (15) ✓ Tatap Muka (1.046) Total Pelayanan Konsultasi 1.051

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022 dan % capaian	Target 2023	Realisasi 2023 dan % capaian
1	Nilai IKM penanganan (pelayanan) Pengaduan	A (88.25)	A (88.25) 100,00%	A (88.50)	A (88.53) 100.03%
2	Jumlah Sistem Informasi yang Berjalan dengan Lancar dan Data Informasi yang Update	2 Sistem	2 Sistem 100%	3 Sistem	3 Sistem 100%
3	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100% 100%	100%	100% 100%
4	Persentase Pemenuhan pelayanan Investor	100%	100% 100%	100%	100% 100%
5	Persentase Pemenuhan Pelayanan Konsultasi	100%	100% 100%	100%	100% 100%

Penjelasan :

- Nilai IKM pelayanan perizinan dan non perizinan bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi dari data analisa survey indeks kepuasan masyarakat di DPMPTSP Prov Kalsel untuk bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi Tahun 2022 sebanyak 10 responden yaitu dengan nilai IKM 86.25 kategori baik), sedangkan Tahun 2023 yaitu dengan nilai IKM
- Jumlah Sistem Informasi yang Berjalan dengan Lancar dan Data Informasi yang Update Tahun 2022 ditargetkan 2 sistem terealisasi 2 sistem dengan capaian

100%, sedangkan Tahun 2023 ditargetkan 3 sistem terealisasi 3 sistem dengan capaian 100%

- Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti tahun 2022 ditargetkan 100% terealisasi 100% dengan capaian 100%, sedangkan Tahun 2023 ditargetkan 100% terealisasi 100% dengan capaian 100%
- Persentase Pemenuhan pelayanan Investor Tahun 2022 ditargetkan 100% terealisasi 100% dengan capaian 100%, sedangkan Tahun 2023 ditargetkan 100% terealisasi 100% dengan capaian 100%
- Persentase Pemenuhan Pelayanan Konsultasi ditargetkan 100% terealisasi 100% dengan capaian 100%, sedangkan Tahun 2023 ditargetkan 100% terealisasi 100% dengan capaian 100%

3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

3.1 Upaya-upaya yang telah dilakukan

Menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan yang transparan, professional, terintegrasi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

3.2 Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

Sarana dan prasarana dan SDM

3.3 Rencana Tindak Lanjut

- Mengadakan forum fasilitasi perusahaan
- Mengadakan forum konsultasi publik
- Melakukan pendampingan terhadap masyarakat/pihak terkait dalam penyelenggaraan pemohon terpadu perizinan dan non perizinan

4) Analisis Program/kegiatan Penunjang Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Pencapaian indikator kinerja diatas, tidak terlepas dari dukungan program yang dilaksanakan selama tahun 2023 yaitu:

- a) Penanaman modal yang menurut Ketentuan peraturan Perundang-undangan Menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- b) Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan penanaman Modal yang terintegrasi pada tingkat Daerah Provinsi

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Anggaran					
		Sub Output	Satuan Unit		Fisik	Keu	Pagu Realisasi		Satuan unit
							S	R	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			13.087.756.472	99,99	84,7	13.087.756.472	11.085.228.322	
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			552.438.600	100	86,73	552.438.600	479.088.670	
X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	310.054.100	100	86,73	310.054.100	268.898.670	3 Dokumen
X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	242.384.500	100	86,72	242.384.500	210.190.000	3 Dokumen
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.071.814.492	100	81,55	8.071.814.492	6.582.396.675	
X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	7.832.548.692	100	82,21	7.832.548.692	6.439.159.275	14 Bulan
X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen	226.981.300	100	57,83	226.981.300	131.252.400	1 Dokumen
X.XX.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan	1 Dokumen	12.284.500	100	97,56	12.284.500	11.985.000	1 Dokumen
		pelaksanaan akuntansi SKPD							
X.XX.01.1.05	AdministrasiKepegawaian Perangkat Daerah			110.808.000	100	77,78	110.808.000	86.195.100	

X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	6 Unit	9.000.000	100	100	9.000.000	9.000.000	6 Unit
X.XX.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	20 Orang	56.644.000	100	82,56	56.644.000	46.767.300	20 Orang
X.XX.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	204 Orang	18.520.000	100	76,4	18.520.000	14.150.000	204 Orang
X.XX.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	23 Orang	26.644.000	100	61,09	26.644.000	16.277.800	23 Orang
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.564.197.700	100	87,06	1.564.197.700	1.361.822.700	
X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket	24.390.100	100	94,3	24.390.100	22.999.000	12 Paket
X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	97.775.000	100	94,97	97.775.000	92.859.900	12 Bulan
X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	24 Buah	454.365.600	100	92,13	454.365.600	418.600.000	24 Buah
X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	60.170.000	100	96,23	60.170.000	57.902.000	12 Paket

X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	139.512.000	100	99,92	139.512.000	139.405.800	1 Dokumen
X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	787.985.000	100	79,96	787.985.000	630.056.000	40 Laporan
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			611.800.000	99,86	94,34	611.800.000	577.125.000	
X.XX.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit	554.770.000	100	94,06	554.770.000	521.800.000	3 Unit
X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	1 Paket	850,000	0	0	850,000	0	0 Paket
X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 Paket	56.180.000	100	98,48	56.180.000	55.325.000	5 Paket
X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.080.117.600	100	84,84	1.080.117.600	916.359.519	
X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	11.735.000	100	85,21	11.735.000	9.999.500	12 Laporan
X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber	12 Laporan	538.000.000	100	80,27	538.000.000	431.857.019	12 Laporan
		daya air dan listrik yang disediakan							

X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	530.382.600	100	89,46	530.382.600	474.503.000	12 Laporan
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.096.580.080	100	98,69	1.096.580.080	1.082.240.658	
X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	502.522.000	100	99,82	502.522.000	501.628.086	24 Unit
X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 Unit	469.098.080	100	97,51	469.098.080	457.423.572	4 Unit
X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	7 Unit	124.960.000	100	98,58	124.960.000	123.189.000	7 Unit
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			738.260.200	100	90,39	738.260.200	667.274.500	
2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			300.211.700	100	82,73	300.211.700	248.368.400	

2.18.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	224.050.500	100	83,2	224.050.500	186.407.400	1 Dokumen
2.18.02.1.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha Di Daerah	1 Dokumen	76.161.200	100	81,36	76.161.200	61.961.000	1 Dokumen
2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi			438.048.500	100	95,63	438.048.500	418.906.100	
2.18.02.1.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen	16.135.600	100	87,3	16.135.600	14.085.800	1 Dokumen
2.18.02.1.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah PeJumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsiraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen	421.912.900	100	95,95	421.912.900	404.820.300	1 Dokumen
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			1.365.464.800	100	92,51	1.365.464.800	1.263.247.350	
2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			1.365.464.800	100	92,51	1.365.464.800	1.263.247.350	
2.18.03.1.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman	Jumlah Peraturan Daerah yang mengatur	1 Dokumen	818.098.000	100	95,02	818.098.000	777.369.400	1 Dokumen
	Modal Kewenangan Provinsi	Promosi penanaman modal Provinsi							

2.18.03.1.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal Provinsi	1 Dokumen	547.366.800	100	88,77	547.366.800	485.877.950	1 Dokumen
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			1.194.497.200	100	91,88	1.194.497.200	1.097.453.240	
2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			1.194.497.200	100	91,88	1.194.497.200	1.097.453.240	
2.18.04.1.02.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang terfasilitasi pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik kewenangan daerah provinsi	6 Pelaku Usaha	550.628.200	100	97,34	550.628.200	535.962.600	6 Pelaku Usaha
2.18.04.1.02.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang terfasilitasi pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal kewenangan daerah provinsi	6 Pelaku Usaha	18.366.000	100	91,17	18.366.000	16.744.000	6 Pelaku Usaha
2.18.04.1.02.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan	80 Orang	79.778.500	100	91,16	79.778.500	72.726.300	80 Orang
Total				17.972.248.072	100	85,72	17.972.248.072	15.406.278.342	

	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	konsultasi dan pengelolaan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan kewenangan daerah provinsi							
2.18.04.1.02.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah kewenangan daerah provinsi	6 Pelaku Usaha	545.724.500	100	86,49	545.724.500	472.020.340	6 Pelaku Usaha
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			942.598.400	100	73,13	942.598.400	689.275.820	
2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			942.598.400	100	73,13	942.598.400	689.275.820	
2.18.05.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Moda	1 kegiatan	82.187.700	100	85,63	82.187.700	70.379.250	1 kegiatan
2.18.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usahayang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	1 Pelaku Usaha	593.254.300	100	72,19	593.254.300	428.258.120	1 Pelaku Usaha

2.18.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	1 kegiatan	267.156.400	100	71,36	267.156.400	190.638.450	1 kegiatan
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			643.671.000	100	93,81	643.671.000	603.799.110	
2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi			643.671.000	100	93,81	643.671.000	603.799.110	
2.18.06.1.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	1 Dokumen	643.671.000	100	93,81	643.671.000	603.799.110	1 Dokumen
Total				17.972.248.072	100	85,72	17.972.248.072	15.406.278.342	

2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program

NO	Sasaran Strategis / Kinerja Utama	Uraian	Anggaran Tahun 2023	Realisasi	Persentase
1.	Peningkatan Investasi	Program Pengembangan iklim penanaman Modal Program promosi Penanaman Modal Program Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal	Rp3.046.323.400	Rp2.619.797.670	85.99%
2.	Peningkatan Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan	Program pelayanan penanaman modal Program Pengelolaan data dan system informasi penanaman modal	Rp1194.497.200	Rp1.194.497.200.	91.88%
3.	Peningkatan Nilai SAKIP	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp13.087.756.472	Rp11.085.228.322	84.70%

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan 2023

Tahun 2022

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11,581,151,192
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	363,880,100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	178,612,600
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	185,267,500
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,470,352,500
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,231,086,700
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	226,981,300
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12,284,500
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	91,040,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	34,591,000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	21,408,000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35,041,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,456,249,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34,397,500
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86,993,600
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	324,430,400
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55,998,500
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	139,512,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	814,917,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	264,651,600
Pengadaan Mebel	82,000,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	182,651,600
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,036,688,500
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15,935,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	498,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	522,753,500
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	898,289,492
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	324,802,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	426,337,492

Lainnya	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	147,150,000
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	456,375,900
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	265,806,400
Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	229,504,100
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	36,302,300
	15,552,201,092
Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	190,569,500
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	37,409,000
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	153,160,500
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	963,141,600
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	963,141,600
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	424,832,000
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	538,309,600
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1,411,017,100
Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1,411,017,100
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	549,624,600
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	18,423,800
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	87,286,200
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	755,682,500
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	872,272,500
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	872,272,500
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	107,077,400
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	531,917,300
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	233,277,800
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	268,242,800

Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	268,242,800
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	268,242,800
PAGU TOTAL	15,552,201,092

2023

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.087.756.472
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	552.438.600
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	310.054.100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	242.384.500
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.071.814.492
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.832.548.692
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	226.981.300
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12.284.500
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	110.808.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	56.644.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	18.520.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	26.644.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.564.197.700
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.390.100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.775.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	454.365.600
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.170.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	139.512.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	787.985.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	611.800.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	554.770.000

Pengadaan Mebel	850,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.180.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.080.117.600
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.735.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	538.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	530.382.600
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.096.580.080
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	502.522.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	469.098.080
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	124.960.000
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	738.260.200
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	300.211.700
Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	224.050.500
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	76.161.200
Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	438.048.500
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	16.135.600
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	421.912.900
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1.365.464.800
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.365.464.800
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	818.098.000
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	547.366.800
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.194.497.200
Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.194.497.200
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	550.628.200
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	18.366.000
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	79.778.500

Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	545.724.500
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	942.598.400
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	942.598.400
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	82.187.700
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	593.254.300
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	267.156.400
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	643.671.000
Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	643.671.000
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	643.671.000
TOTAL	17.972.248.072

No	2022		2023	
1.	Belanja Operasi	Rp.15.287.549.492	Belanja Operasi	Rp.15.360.448.072
2.	Belanja Modal	Rp.264.651.600	Belanja Modal	Rp.611.800.000
	Total	Rp.15.552.201.092	Total	Rp.17.972.248.072

b) DEKONSENTRASI

Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI)

1. Dasar Hukum
DIPA Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI)
Nomor 065.01..3.159002/2021
2. Instansi Dekonsentrasi
Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI)
3. Program dan Kegiatan
Program Penanaman Modal, Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV
4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi Belanja instansi pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp143.282.700,00 atau 95.52 persen dari anggaran belanja sebesar Rp150.000.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023

URAIAN	2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Barang	150.000.000	143.282.700	95.52 %
Total Belanja Kotor	150.000.000	143.282.700	95.52 %
Pengembalian Belanja	0	0	0
Jumlah	150.000.000	143.282.700	95.52 %

5. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dana dekonsentrasi yang diturunkan BKPM RI kepada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun Anggaran 2023 bertujuan untuk mengawasi perusahaan baik PMA maupun PMDN yang melaksanakan kegiatannya di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dengan target 1 Lembaga, adapun pelaksanaannya DPMPTSP dapat merealisasikan sebanyak 12 Proyek sehingga capaian kinerja sebesar 100,00%

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

1. Dasar Hukum

DIPA Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 010.04.3.484172/2021

2. Instansi Dekonsentrasi

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI)

3. Program dan Kegiatan

Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan desa, Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah

4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi Belanja instansi pada Semester II TA 2023 adalah sebesar Rp114.240.000,00 atau 95.70 persen dari anggaran belanja sebesar Rp114.240.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada Semester II TA 2023 adalah sebagai berikut:

5. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dana dekonsentrasi yang diturunkan KEMENDAGRI RI kepada DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun Anggaran 2023 Identifikasi dan inventarisasi data penyelenggaraan perizinan dan non perizinan Kab/Kota se Kalsel dengan target 1 Rekomendasi Kebijakan dan merealisasikan 1 Rekomendasi Kebijakan capaian kinerja 100%.

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023

URAIAN	2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Barang	114.240.000	109.326.600	95.70 %
Total Belanja Kotor	114.240.000	109.326.600	95.70 %
Pengembalian Belanja	0	0	0
Jumlah	114.240.000	109.326.600	95.70 %

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan sebagai instansi teknis yang melayani kegiatan Promosi, selalu berusaha untuk memanfaatkan sumber dana dan sarana yang ada dengan baik, dan berusaha melaksanakan tugas seoptimal mungkin dengan memperhatikan point-point yang dipaparkan sebelumnya, tingkat keberhasilan pencapaian pelaksanaan tugas DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan secara umum dapat dikatakan berhasil, karena target yang ada dapat dicapai dengan baik.

Penyusunan LAKIP DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 adalah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, artinya telah melaksanakan kinerja berdasarkan Rencana Strategik yang di dalamnya berisi sasaran-sasaran stratejik yang harus dipertanggung jawabkan. Sasaran stratejik tersebut merupakan gambaran tentang apa yang ingin dicapai oleh instansi pada tahun 2023 dan dituangkan dalam dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2023. Dengan demikian di dalam LAKIP Tahun 2023 ini DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan telah berusaha menjawab dan membuktikan bahwa amanah yang diberikan kepada instansi dapat dipertanggung jawabkan.

Dapat disimpulkan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 dengan 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu realisasi investasi dan indeks kepuasan masyarakat (IKM). Adapun capaian realisasi investasi sebesar 146.15%, sedangkan capaian nilai IKM sebesar 106,50%. Dapat disimpulkan capaian kinerja DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan dengan klarifikasi ***sangat memuaskan***.

B. Solusi Mengatasi Kendala untuk Peningkatan Kinerja Mendatang

Disamping itu, dalam rangka untuk mengurangi permasalahan yang ada, DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan telah mengupayakan beberapa hal sebagai berikut::

1. Dilaksanakannya kegiatan sosialisasi, pelatihan dan sinkronisasi dalam rangka peningkatan sumber daya manusia baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
2. Mengikuti kegiatan/event promosi potensi daerah, baik berupa pameran, Rapat Koordinasi, pertemuan antar BKPM RI, DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota serta para investor, dan menggalang kemitraan.
3. Pelaksanaan evaluasi LKPM
4. Melakukan rapat-rapat koordinasi regional guna pemecahan masalah investasi.
5. Upaya peningkatan pengetahuan terhadap pegawai terus dilakukan baik yang bersifat formal maupun non formal, seperti pelatihan, pendidikan, kursus-kursus dan sebagainya. Ini dimaksudkan untuk menambah wawasan bagi aparatur.
6. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap perusahaan PMA/PMDN terus dilakukan agar perusahaan PMA/PMDN berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
7. Melengkapi penyelesaian permasalahan tersebut di atas dengan memanfaatkan Tim TASK FORCE telah diupayakan penyelesaiannya baik Task Force di pusat maupun di daerah. Hal ini guna mengembalikan iklim investasi yang lebih kondusif. Tugas dari pada Tim Task Force ini meliputi berbagai aspek permasalahan yang dihadapi oleh para investor khususnya investor PMA/PMDN.
8. Melakukan rapat-rapat koordinasi guna pemecahan masalah yang terkait dengan stakeholder.

Atas dasar kondisi sebagaimana disimpulkan di atas, maka strategi yang perlu ditempuh untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja Kegiatan Langsung yang merupakan bagian dari Rencana Strategik 2021-2026 agar benar-benar dapat disusun sesuai kaidah-kaidah yang berlaku;
2. Pelaksanaan kegiatan belanja langsung agar mengacu pada prinsip-prinsip money follow program (efisien, ekonomis, dan efektif);
3. Pengawasan/pengendalian internal DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan agar dilaksanakan secara optimal sehingga mampu berdaya guna dan berhasil guna;
4. Petugas yang dilibatkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan agar benar-benar memahami fungsi dan tanggung jawab masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku.